



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/PMK.02/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 meliputi:
  - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
  - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sub keluaran (*sub output*) Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan, dan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3); dan
  - b. sub keluaran (*sub output*) Penelitian.

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2021;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2022; dan/atau
- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

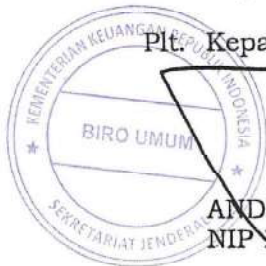
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 945

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 112/PMK.02/2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSN13  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)</b>			
	a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	51.700.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	410.200.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	758.300.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.493.100.000	
	5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.725.100.000	
	b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
<b>2</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)</b>			
	a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	17.300.000	
	2) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	135.900.000	
	3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	252.800.000	
	4) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	497.800.000	
	5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker	1 Dokumen	575.100.000	
	b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L			
	1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
<b>3</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)</b>			
	a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	1 Per Peserta	30.261.000	
	b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	22.125.000	
	c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	20.230.000	
<b>4</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)</b>			
	a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II	1 Per Peserta	9.296.000	
	b. Diklat Prajabatan Golongan III	1 Per Peserta	9.296.000	
	c. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Per Peserta	2.242.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
5	<b>Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)</b>			
	a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Aceh	1 LHA	27.300.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000	
	3) Riau	1 LHA	25.500.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000	
	5) Jambi	1 LHA	21.200.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	24.200.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000	
	8) Lampung	1 LHA	17.700.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	22.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000	
	11) Banten	1 LHA	15.300.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	14.400.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	23.900.000	
	17) Bali	1 LHA	28.500.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	29.800.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	31.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	33.100.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	29.000.000	
	31) Maluku	1 LHA	37.100.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	34.600.000	
	33) Papua	1 LHA	45.400.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	48.500.000	
	b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Aceh	1 LHA	58.300.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000	
	3) Riau	1 LHA	56.500.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000	
	5) Jambi	1 LHA	52.200.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
	8) Lampung	1 LHA	48.700.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000	
	11) Banten	1 LHA	46.200.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	54.900.000	
	17) Bali	1 LHA	59.500.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	59.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
	31) Maluku	1 LHA	68.000.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	65.500.000	
	33) Papua	1 LHA	76.400.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
	c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Aceh	1 LHA	125.800.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
	3) Riau	1 LHA	142.700.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
	5) Jambi	1 LHA	109.400.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
	8) Lampung	1 LHA	93.600.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
	11) Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
	16) Bali	1 LHA	161.600.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
	30) Maluku	1 LHA	157.900.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	142.700.000	
	32) Papua	1 LHA	203.000.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	187.200.000	
<b>6</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNi3 (SBK Dokumen RSNi3)</b>			
	a. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republiksi- <i>Reprint</i>			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.060.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.060.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.060.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	99.060.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	99.060.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
	b. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	360.840.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	528.880.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	626.780.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
	c. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	388.825.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.295.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	649.235.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.435.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.935.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.625.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.275.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.730.000	
	d. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	390.340.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	485.840.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	653.880.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	751.780.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	860.550.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	975.670.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.137.590.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.237.790.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.410.430.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.510.630.000	

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Riset Pembinaan/Kapasitas (SBK Riset Pembinaan/Kapasitas)	1 Laporan	20.000.000	
2	Standar Biaya Keluaran Riset Dasar (SBK Riset Dasar)			
	a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000	
	b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000	
	c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	307.000.000	
	d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000	
	e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000	
	f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hanlcam)	1 Laporan	235.000.000	
	g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	179.960.000	
	h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.050.000	



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000	
	j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	120.000.000	
	k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	230.000.000	
	l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	p. SBK Riset Dasar Teoritis	1 Laporan	40.545.200	
<b>3</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Riset Terapan (SBK Riset Terapan)</b>			
	a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	216.000.000	
	b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	221.900.000	
	c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	448.800.000	
	d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	143.200.000	
	e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	208.400.000	
	f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	400.200.000	
	g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	370.800.000	
	h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	209.000.000	
	i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	327.500.000	
	j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	150.000.000	
	k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	165.000.000	
	l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
<b>4</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Riset Pengembangan (SBK Riset Pengembangan)</b>			
	a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	568.100.000	
	b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	1.124.800.000	
	c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.048.100.000	
	d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	349.600.000	
	e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	402.500.000	
	f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	559.600.000	
	g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	724.038.000	
	h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	301.500.000	
	i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.083.700.000	
	j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	515.000.000	
<b>5</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Kajian Aktual Strategis (SBK Kajian Aktual Strategis)</b>	1 Naskah Kebijakan	60.000.000	



PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK  
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNi3**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat  
SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat merupakan SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh Satker Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal Satker Eselon I/Setingkat secara organisasi membawahi Satker Eselon II/Setingkat (termasuk Eselon III/Setingkat dan/atau Eselon IV/Setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi Eselon I/Setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh Satker dilingkup Eselon I/Setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.
- b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L  
SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L merupakan SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh Eselon I/Setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK  
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat  
SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat merupakan SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh Satker Unit organisasi lini K/L Setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat.  
Dalam hal Satker Eselon I/Setingkat secara organisasi membawahi Satker Eselon II/Setingkat (termasuk Eselon III/Setingkat dan/atau Eselon IV/Setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi Eselon I/Setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh Satker dilingkup Eselon I/Setingkat tersebut.
- b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L  
SBK Dokumen LAKIN untuk K/L merupakan SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

**3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)**

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjurangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)**

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan

proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

**5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)**

SBK Audit Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama  
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi Satker APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota  
SBK Audit Kinerja Dalam Kota merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi Satker APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi  
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi Satker APIP.

**6. Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNI3 (SBK Dokumen RSNI3)**

SBK Dokumen RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.



Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran (*output*) akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

## **B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

### **1. Standar Biaya Keluaran Pembinaan/Kapasitas (SBK Riset Pembinaan/Kapasitas)**

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).



- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

## **2. Standar Biaya Keluaran Riset Dasar (SBK Riset Dasar)**

SBK Riset Dasar merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).
- b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk

kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju  
SBK Riset Dasar Bidang Material Maju merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.



1. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.



- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- p. SBK Riset Dasar Teoritis  
SBK Riset Dasar Teoritis merupakan kelompok ini melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini merupakan dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invenisi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

### **3. Standar Biaya Keluaran Riset Terapan (SBK Riset Terapan)**

SBK Riset Terapan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi

komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
- g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.
- h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan



maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.
- k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.
- l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
- SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian

bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

#### **4. Standar Biaya Keluaran Riset Pengembangan (SBK Riset Pengembangan)**

SBK Riset Pengembangan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI),



perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan

teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia.

- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.

- i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

#### **5. Standar Biaya Keluaran Aktual Strategis (SBK Kajian Aktual Strategis)**

SBK Kajian Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

#### **Catatan Umum:**

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.



2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. buku nasional;
  - f. buku internasional;
  - g. naskah kebijakan;
  - h. artikel populer di media cetak;
  - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
  - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.

4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
  
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.
  
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;

- d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;



- j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;

- o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
  - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
  - v. prototipe laik *preklinis*;
  - w. herbal terstandar;
  - x. paten sederhana terdaftar;
  - y. merek dagang terdaftar;
  - z. desain industri terdaftar;
  - aa. rahasia dagang terdaftar;
  - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
  - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
  - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. paten sederhana terdaftar;
  - l. merek dagang terdaftar;
  - m. desain industri terdaftar;
  - n. rahasia dagang terdaftar;

- o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
  - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
  - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
  - n. paten sederhana terdaftar;
  - o. merek dagang terdaftar;
  - p. desain industri terdaftar;
  - q. rahasia dagang terdaftar;
  - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
  - t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
  - u. fitofarmaka.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000



(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
27	Material untuk produk biologi	50.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP. 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112/PMK.02/2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	<b>Badan Pemeriksa Keuangan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 LHP LK Pemerintah Pusat	1 LHP	13.328.635.000	
	2 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada AKN V	10 LHP	156.770.000	
	3 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh	251 LHP	560.318.000	
	4 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	345 LHP	827.148.000	
	5 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau	144 LHP	350.399.000	
	6 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	75 LHP	204.388.000	
	7 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi	130 LHP	284.992.000	
	8 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	198 LHP	498.732.000	
	9 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	211 LHP	492.862.000	
	10 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung	168 LHP	385.424.000	
	11 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	125 LHP	271.810.000	
	12 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81 LHP	102.900.000	
	13 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Banten	104 LHP	244.265.000	
	14 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	278 LHP	689.292.000	
	15 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	11 LHP	13.567.000	
	16 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	332 LHP	824.192.000	
	17 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	55 LHP	162.724.000	
	18 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	387 LHP	1.005.858.000	
	19 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bali	69 LHP	286.096.000	
	20 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	128 LHP	294.737.000	
	21 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	242 LHP	547.798.000	
	22 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	166 LHP	360.124.000	
	23 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	154 LHP	369.721.000	
	24 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	146 LHP	325.676.000	
	25 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	110 LHP	518.690.000	
	26 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	103 LHP	401.084.000	
	27 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	68 LHP	195.239.000	
	28 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	82 LHP	197.899.000	
	29 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	275 LHP	648.250.000	
	30 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	118 LHP	397.048.000	
	31 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	178 LHP	486.520.000	
	32 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku	130 LHP	394.120.000	
	33 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	109 LHP	333.309.000	
	34 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua	260 LHP	1.189.940.000	
	35 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	116 LHP	451.062.000	
	36 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	63 LHP	186.816.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Urur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Pemerolehan Keyakinan Mutu Kinerja Pemeriksaan</b>			
37	Laporan Hasil Penilaian Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 Laporan	1.164.931.000	
	<b>Laporan Hasil Pemerolehan Keyakinan Mutu Kelembagaan</b>			
38	Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Kelembagaan	6 Laporan	3.349.419.000	
39	Laporan Reviu atas Konsep LK BPK	4 Laporan	3.812.980.000	
40	Laporan Reviu atas Konsep RKA BPK	1 Laporan	251.690.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penilaian Kompetensi</b>			
41	Penilaian Kompetensi Pemeriksa	1 Batch	167.273.000	
	<b>LHP Tematik</b>			
42	LHP Tematik AKN I	1 LHP	8.837.380.000	
43	LHP Tematik AKN II	1 LHP	8.837.380.000	
44	LHP Tematik AKN III	1 LHP	8.837.380.000	
45	LHP Tematik AKN IV	1 LHP	8.837.380.000	
46	LHP Tematik AKN V	1 LHP	8.837.380.000	
47	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	8.837.380.000	
48	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	8.837.380.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
49	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN I	1 LHP	1.084.789.000	
50	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN II	1 LHP	1.455.359.000	
51	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN III	1 LHP	783.998.000	
52	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN IV	1 LHP	1.911.500.000	
53	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN V	1 LHP	1.266.448.000	
54	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN VI	1 LHP	1.807.588.000	
55	Laporan Hasil Pemeriksaan AKN VII	1 LHP	1.355.357.000	
56	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	287.195.000	
57	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	245.156.000	
58	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	336.176.000	
59	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 LHP	310.959.000	
60	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	297.068.000	
61	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	267.429.000	
62	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	345.193.000	
63	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	249.568.000	
64	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	267.683.000	
65	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	324.053.000	
66	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	316.292.000	
67	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 LHP	302.449.000	
68	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	727.192.000	
69	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	201.973.000	
70	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 LHP	343.154.000	
71	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 LHP	329.311.000	
72	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	369.709.000	
73	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHP	273.783.000	
74	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHP	260.000.000	
75	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	279.530.000	
76	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	276.394.000	
77	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	258.172.000	
78	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	311.776.000	
79	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	314.018.000	
80	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	299.204.000	
81	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	275.721.000	
82	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	285.737.000	
83	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	349.948.000	
84	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	278.511.000	
85	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	325.063.000	
86	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	274.590.000	
87	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	432.437.000	
88	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	335.092.000	
89	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	306.109.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Evaluasi KAP</b>			
90	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN I	1 Laporan	210.775.000	
91	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN II	1 Laporan	210.775.000	
92	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN III	1 Laporan	210.775.000	
93	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN IV	1 Laporan	210.775.000	
94	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN V	1 Laporan	210.775.000	
95	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VI	1 Laporan	210.775.000	
96	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VII	1 Laporan	210.775.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN I</b>			
97	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
98	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN II</b>			
99	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
100	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN III</b>			
101	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
102	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN IV</b>			
103	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
104	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan AKN V</b>			
105	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
106	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN VI</b>			
107	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
108	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN VII</b>			
109	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
110	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.246.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh</b>			
111	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.001.000	
112	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	20.770.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>			
113	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.089.000	
114	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.886.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau</b>			
115	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.747.000	
116	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.265.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau</b>			
117	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.207.000	
118	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	23.275.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi</b>			
119	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.825.000	
120	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.190.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</b>			
121	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.675.000	
122	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	22.585.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan</b>			
123	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.391.000	
124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.565.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Lampung</b>			
125	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.179.000	
126	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.601.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu</b>			
127	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.253.000	
128	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	22.012.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>			
129	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.741.000	
130	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.736.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Banten</b>			
131	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.387.000	
132	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.341.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat</b>			
133	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.031.000	
134	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	22.219.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b>			
135	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	73.983.000	
136	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.833.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</b>			
137	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.757.000	
138	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	20.788.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</b>			
139	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.177.000	
140	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.048.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur</b>			
141	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.745.000	
142	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	23.374.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bali</b>			
143	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.845.000	
144	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.920.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
145	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.331.000	
146	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.049.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
147	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.141.000	
148	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.304.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat</b>			
149	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.201.000	
150	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.382.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
151	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.787.000	
152	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	22.267.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
153	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.913.000	
154	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	20.782.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</b>			
155	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.385.000	
156	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.407.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara</b>			
157	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.991.000	
158	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	23.371.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>			
159	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.919.000	
160	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.615.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat</b>			
161	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.947.000	
162	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.417.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
163	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.413.000	
164	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.004.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
165	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.693.000	
166	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.398.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
167	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.641.000	
168	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	24.670.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku</b>			
169	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.993.000	
170	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.064.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara</b>			
171	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.083.000	
172	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.697.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua</b>			
173	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	32.561.000	
174	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	37.288.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat</b>			
175	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	29.011.000	
176	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.417.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara</b>			
177	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.121.000	
178	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.618.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
179	LHP Interim/Pendahuluan AKN I	1 Laporan	391.609.000	
180	LHP Interim/Pendahuluan AKN II	1 Laporan	470.417.000	
181	LHP Interim/Pendahuluan AKN III	1 Laporan	461.626.000	
182	LHP Interim/Pendahuluan AKN IV	1 Laporan	768.047.000	
183	LHP Interim/Pendahuluan AKN V	1 Laporan	470.417.000	
184	LHP Interim/Pendahuluan AKN VI	1 Laporan	768.047.000	
185	LHP Interim/Pendahuluan AKN VII	1 Laporan	470.417.000	
186	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	178.247.000	
187	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	169.632.000	
188	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	255.802.000	
189	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	235.433.000	
190	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	212.689.000	
191	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	191.501.000	
192	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	259.404.000	
193	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	176.494.000	
194	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	183.400.000	
195	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	231.510.000	
196	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	234.928.000	
197	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	218.306.000	
198	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	402.825.000	
199	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	188.663.000	
200	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	262.831.000	
201	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	225.598.000	
202	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	272.133.000	
203	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTB	1 Laporan	192.732.000	
204	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTT	1 Laporan	178.095.000	
205	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	201.928.000	
206	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	190.456.000	
207	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	179.004.000	
208	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	230.049.000	
209	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	235.544.000	
210	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	204.623.000	
211	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	199.711.000	
212	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	197.086.000	
213	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	266.323.000	
214	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	202.923.000	
215	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	243.868.000	
216	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	200.319.000	
217	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	320.207.000	
218	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	233.424.000	
219	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	224.481.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penegakan Integritas</b>			
	220 Laporan Pemberkasan	1 Laporan	157.937.000	
	221 Laporan Reviu Integritas	1 Laporan	168.341.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	222 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal BPK	1 Laporan	196.059.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Pemerolehan Keyakinan Mutu Kinerja Pemeriksaan</b>			
	223 Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	247.600.000	
	<b>Perangkat Pembelajaran</b>			
	224 Kurikulum Diklat dengan Mata Diklat Jamak	1 Unit	42.089.000	
	225 Silabus dan Bahan Ajar Diklat Jamak	1 Unit	157.458.000	
	226 Rancangan Diklat dan Bahan Ajar Diklat Tunggal	1 Unit	39.648.000	
	<b>Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara</b>			
	227 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	599.671.000	
	228 Diklat Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia	1 Angkatan	227.192.000	
	229 Diklat Sertifikasi Akuntan Publik	1 Angkatan	128.352.000	
	230 Diklat Eksternal Pemeriksaan Keuangan Negara dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Angkatan	120.380.000	
	231 Diklat Internasional Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	98.993.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	232 LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	786.269.000	
	233 Laporan Penelaahan Informasi Awal	1 Laporan	67.983.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	<b>Kepaniteraan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Putusan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>			
	1 Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.698.943	
	2 Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	970.114	
	3 Putusan Perkara PHI (yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah)	1 Perkara	833.630	
005.03	<b>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu</b>			
	1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	610.000	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	977.000	
	3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	440.000	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku Utara	1 perkara	936.000	
	5 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	1.553.000	
	6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	571.000	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	897.000	
	8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	402.000	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Banten	1 perkara	907.000	
	10 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	1.533.000	
	11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	571.000	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	509.000	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	15 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.505.000	
	16 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	543.000	
	17 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	877.000	
	18 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	422.000	
	19 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	907.000	
	20 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	1.517.000	
	21 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	557.000	
	22 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	900.000	
	23 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	481.000	
	24 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	860.000	
	25 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	1.495.000	
	26 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	592.000	
	27 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	750.000	
	28 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	445.000	
	29 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	681.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	30 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	1.349.000	
	31 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 perkara	556.000	
	32 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	897.000	
	33 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	427.000	
	34 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	889.000	
	35 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	1.349.000	
	36 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	556.000	
	37 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	897.000	
	38 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	401.000	
	39 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Yogyakarta	1 Perkara	889.000	
	40 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	1.349.000	
	41 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	557.000	
	42 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	897.000	
	43 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	399.000	
	44 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	874.000	
	45 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	1.349.000	
	46 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	571.000	
	47 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	900.000	
	48 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	470.000	
	49 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	853.000	
	50 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.349.000	
	51 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	572.000	
	52 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.040.000	
	53 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	487.000	
	54 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.027.000	
	55 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.367.000	
	56 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	572.000	
	57 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.040.000	
	58 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	487.000	
	59 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.027.000	
	60 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.407.000	
	61 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	572.000	
	62 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	1.040.000	
	63 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	487.000	
	64 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.027.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
65	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.367.000	
66	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	572.000	
67	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.040.000	
68	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	487.000	
69	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.027.000	
70	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.457.000	
71	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	572.000	
72	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.040.000	
73	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	487.000	
74	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.027.000	
75	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.367.000	
76	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	572.000	
77	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.040.000	
78	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	487.000	
79	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Lampung	1 Perkara	1.027.000	
80	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.407.000	
81	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	580.000	
82	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	938.000	
83	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	399.000	
84	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Kalimantan Barat	1 Perkara	890.000	
85	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	1.507.000	
86	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	540.000	
87	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	937.000	
88	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	397.000	
89	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	880.000	
90	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	1.501.000	
91	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	550.000	
92	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	897.000	
93	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	398.000	
94	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	880.000	
95	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	1.501.000	
96	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	550.000	
97	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	897.000	
98	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	398.000	
99	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	890.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	1.533.000	
101	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	550.000	
102	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	897.000	
103	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	395.000	
104	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	880.000	
105	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	1.501.000	
106	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	411.000	
107	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	902.000	
108	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	402.000	
109	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	880.000	
110	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	1.515.000	
111	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	580.000	
112	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	937.000	
113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	405.000	
114	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	641.000	
115	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	1.541.000	
116	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	543.000	
117	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	876.000	
118	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	523.000	
119	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	647.000	
120	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	1.515.000	
121	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	669.000	
122	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.056.000	
123	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	569.000	
124	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku	1 Perkara	920.000	
125	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.522.000	
126	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	571.000	
127	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.056.000	
128	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	560.000	
129	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	956.000	
130	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.567.000	
131	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	557.000	
132	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	897.000	
133	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	551.000	
134	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	735.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
135	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	1.537.000	
136	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	557.000	
137	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	897.000	
138	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	535.000	
139	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	941.000	
140	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	1.537.000	
141	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	647.000	
142	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	1.057.000	
143	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	492.000	
144	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.036.000	
145	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.665.000	
146	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	571.000	
147	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.042.000	
148	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	468.000	
149	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Bengkulu	1 Perkara	1.027.000	
150	Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.505.000	
	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>			
151	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	920.000	
152	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten	1 Perkara	920.000	
153	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	920.000	
154	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	920.000	
155	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	920.000	
156	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	920.000	
157	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	920.000	
158	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	920.000	
159	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	920.000	
160	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	920.000	
161	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	920.000	
162	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	920.000	
163	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	1 Perkara	920.000	
164	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	1 Perkara	920.000	
165	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Palembang	1 Perkara	920.000	
166	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	1 Perkara	920.000	
167	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	750.000	
168	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	760.000	
169	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	760.000	
170	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	800.000	
171	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	760.000	
172	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	920.000	
173	Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	790.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	174 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	920.000	
	175 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	1 Perkara	920.000	
	176 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Denpasar	1 Perkara	920.000	
	177 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	920.000	
	178 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	920.000	
	179 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	1 Perkara	920.000	
	180 Perkara Peradilan yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	920.000	
005.05	<b>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu</b>			
	1 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	537.000	
	2 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	747.000	
	3 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	880.050	
	4 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Wilayah Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	613.000	
	5 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	910.333	
	6 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	530.000	
	7 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	1.306.250	
	8 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	897.495	
	9 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 01 Banda Aceh	1 Perkara	809.454	
	10 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 02 Medan	1 Perkara	757.445	
	11 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 03 Padang	1 Perkara	820.920	
	12 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 04 Palembang	1 Perkara	722.093	
	13 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 05 Pontianak	1 Perkara	833.388	
	14 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 06 Banjarmasin	1 Perkara	796.333	
	15 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 07 Balikpapan	1 Perkara	852.037	
	16 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 08 Jakarta	1 Perkara	712.280	
	17 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 09 Bandung	1 Perkara	662.388	
	18 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 10 Semarang	1 Perkara	710.142	
	19 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 11 Yogyakarta	1 Perkara	764.200	
	20 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 12 Surabaya	1 Perkara	687.750	
	21 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama Wilayah Hukum DILMIL III - 13 Madiun	1 Perkara	761.875	
	22 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 14 Denpasar	1 Perkara	780.900	
	23 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 15 Kupang	1 Perkara	859.366	
	24 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 16 Makassar	1 Perkara	775.343	
	25 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama Wilayah Hukum DILMIL III - 17 Manado	1 Perkara	822.052	
	26 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 18 Ambon	1 Perkara	800.000	
	27 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 19 Jayapura	1 Perkara	1.021.060	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Literatur</b>			
	1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap	20 Literatur	909.450.000	
	<b>Modul</b>			
	2 Penyusunan Modul Fakultas Politik Pemerintahan	13 Modul	506.200.000	
	3 Penyusunan Modul Fakultas Manajemen Pemerintahan	14 Modul	532.475.000	
	4 Penyusunan Modul Fakultas Hukum Tata Pemerintahan	13 Modul	506.469.000	
	<b>RPS/RTM</b>			
	5 Penyusunan RPS dan RTM Pengajaran Semester Ganjil dan Genap	54 RPS dan RTM	508.796.000	
	6 Penyusunan RPS dan RTM Pelatihan Semester Ganjil dan Genap Mata Kuliah Prodi dan Fakultas	145 RPS dan RTM	1.222.710.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penilaian Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</b>			
	7 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	116.190.000	
	8 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	126.340.000	
	9 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	132.660.000	
010.12	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Angkatan Diklat Teknis Bidang Standarisasi dan Sertifikasi</b>			
	1 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	80.409.000	
	2 Diklat 6 Hari	1 Angkatan	91.272.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat</b>			
	3 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	80.409.000	
	<b>Diklat Teknis Bidang Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan</b>			
	4 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	80.409.000	
	<b>Diklat Teknis Bidang Fungsional dan Teknis</b>			
	5 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	80.409.000	
	6 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	148.175.000	
	7 Diklat 14 Hari	1 Angkatan	174.213.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional</b>			
	8 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	80.409.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	<b>Kementerian Pertahanan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	1 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	28.497.000	
	2 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	32.620.000	
	3 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	35.567.000	
	4 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	29.674.000	
	5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	118.828.000	
	6 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	8.423.000	
	7 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	9.172.000	
	8 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	9.708.000	
	9 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	8.637.000	
	10 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	24.862.000	
	11 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.113.000	
	12 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.452.000	
	13 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	16.470.000	
	14 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.077.000	
	15 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	39.841.000	
	15 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	11.944.000	
	17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	12.747.000	
	18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	13.336.000	
	19 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	12.319.000	
	20 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	28.663.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
	21 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	26.432.000	
	22 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	30.931.000	
	23 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.145.000	
	24 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	27.717.000	
	25 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	124.968.000	
	26 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.719.000	
	27 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.593.000	
	28 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.932.000	
	29 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.255.000	
	30 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	50.764.000	
	31 Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.756.000	
	32 Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.845.000	
	33 Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.398.000	
	34 Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.934.000	
	35 Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	56.716.000	
	36 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	14.808.000	
	37 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	17.807.000	
	38 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	19.950.000	
	39 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	15.665.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 <b>Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)</b>	1 Layanan	80.484.000	
41	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion) <b>Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan</b>	1 Layanan	906.000	
42	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) <b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian</b>	1 Perkara	8.487.000	
43	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-26	1 Lulusan	5.471.000	
44	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-27	1 Lulusan	5.471.000	
45	Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian PBB Ke-28	1 Lulusan	5.471.000	
46	Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-5	1 Lulusan	5.471.000	
47	Kursus Intensif Bahasa Perancis bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-7	1 Lulusan	5.471.000	
48	Kursus Intensif Bahasa Perancis bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-8 <b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah</b>	1 Lulusan	5.471.000	
49	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah DKI	1 Lulusan	5.471.000	
50	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jatim	1 Lulusan	5.471.000	
51	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jabar <b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar</b>	1 Lulusan	5.471.000	
52	KIBINA Tk. Dasar ke-20	1 Lulusan	7.103.000	
53	KIBINA Tk. Dasar ke-21	1 Lulusan	7.103.000	
54	KIBINA Tk. Dasar ke-22 <b>Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris</b>	1 Lulusan	7.103.000	
55	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris <b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris</b>	1 Lulusan	5.471.000	
56	KIBI ke-98	1 Lulusan	5.471.000	
57	KIBI ke-99	1 Lulusan	5.471.000	
58	Kursus Intensif Bahasa Inggris <i>Executive</i>	1 Lulusan	5.471.000	
59	Kursus Intensif Bahasa Inggris PNS Kemhan	1 Lulusan	5.471.000	
60	Kursus Intensif Bahasa Inggris TOEFL	1 Lulusan	5.471.000	
61	Kursus Intensif Bahasa Inggris Alih Bahasa <b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Tk. Menengah</b>	1 Lulusan	5.471.000	
62	KIBINA Tk. Menengah <b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Perwira SAF</b>	1 Lulusan	7.103.000	
63	KIBINA bagi Perwira SAF <b>Lulusan Kursus Bahasa Asing (Non Inggris)</b>	1 Lulusan	7.103.000	
64	Kursus Intensif Bahasa Arab	1 Lulusan	5.471.000	
65	Kursus Intensif Bahasa Korea	1 Lulusan	5.471.000	
66	Kursus Intensif Bahasa Mandarin	1 Lulusan	5.471.000	
67	Kursus Intensif Bahasa Perancis	1 Lulusan	5.471.000	
68	Kursus Intensif Bahasa Rusia	1 Lulusan	5.471.000	
69	Kursus Intensif Bahasa Jepang	1 Lulusan	5.471.000	
70	Kursus Intensif Bahasa Jerman <b>Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama</b>	1 Lulusan	5.471.000	
71	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama <b>Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan</b>	1 Lulusan	5.603.883	
72	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan <b>Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan</b>	1 Lulusan	5.874.266	
73	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan <b>Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan</b>	1 Lulusan	7.786.288	
74	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan <b>Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda</b>	1 Lulusan	5.498.588	
75	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda <b>Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan</b>	1 Lulusan	5.907.211	
76	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan <b>Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan</b>	1 Lulusan	6.375.033	
77	Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan	1 Lulusan	5.605.050	
78	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan <b>Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan</b>	1 Lulusan	5.236.966	
79	Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan <b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan</b>	1 Lulusan	5.433.200	
80	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Terampil	1 Lulusan	9.478.400	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	81 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli	1 Lulusan	7.931.000	
	82 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Muda	1 Lulusan	8.648.400	
	83 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1 Lulusan	11.006.200	
	84 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Katalog Tingkat Dasar	1 Lulusan	6.791.000	
	85 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lulusan	648.000	
	86 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Kinerja	1 Lulusan	648.000	
	87 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Investigatif	1 Lulusan	648.000	
	88 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keamanan Jaringan Komputer	1 Lulusan	7.405.200	
	89 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Web Programming Komputer	1 Lulusan	7.495.200	
	90 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mikrotik Komputer	1 Lulusan	8.250.000	
	91 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bendahara Pengeluaran	1 Lulusan	522.700	
	92 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Staf Pejabat Pembuat Komitmen	1 Lulusan	522.700	
	93 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Penganggaran Bagi Staf Perencana	1 Lulusan	522.700	
	94 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	1 Lulusan	522.700	
	95 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penilaian dan Penetapan Angkat Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	1 Lulusan	522.700	
	96 Pendidikan dan Pelatihan Teknis <i>Cyber Defence</i> Tingkat Terampil	1 Lulusan	8.430.000	
	97 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar Desain Grafis dan Foto Editor	1 Lulusan	657.060	
	98 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprotokol dan <i>Master of Ceremony</i> (MC)	1 Lulusan	480.000	
	99 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Presentasi dan Komunikasi <b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS</b>	1 Lulusan	480.000	
	100 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS <b>Diklat Bela Negara</b>	1 Lulusan	5.191.000	
	101 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Perguruan Tinggi /Setingkat	1 Lulusan	1.204.500	
	102 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Setingkat <b>Perekrutan Komponen Cadangan</b>	1 Lulusan	1.204.500	
	103 Perekrutan Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon I	1 Orang	3.915.900	
	104 Perekrutan Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon II	1 Orang	4.051.080	
	105 Perekrutan Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon III	1 Orang	4.337.540	
	106 Perekrutan Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.952.660	
	107 Perekrutan Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon V <b>Latsarmil Anggota Komponen Cadangan</b>	1 Orang	8.377.940	
	108 Latsarmil Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon I	1 Orang	11.868.063	
	109 Latsarmil Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon II	1 Orang	12.225.823	
	110 Latsarmil Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon III	1 Orang	12.407.890	
	111 Latsarmil Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	12.343.263	
	112 Latsarmil Komponen Cadangan Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon V	1 Orang	14.528.650	
012.21	<b>Markas Besar TNI</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI</b>			
	1 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Orang	115.994	
	2 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Orang	118.094	
	3 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Orang	116.994	
	4 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Orang	121.194	
	5 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Orang	124.294	
	6 Rahwan Rayon I	1 Orang	146.994	
	7 Rahwan Rayon II	1 Orang	149.094	
	8 Rahwan Rayon III	1 Orang	148.094	
	9 Rahwan Rayon IV	1 Orang	152.194	
	10 Rahwan Rayon V	1 Orang	155.294	
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI</b>			
	11 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	369.368	
	<b>Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia</b>			
	12 Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Orang	2.298.031	
	13 Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Orang	7.271.635	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14 Purna Tugas Yon Mekanis TNI (850 Orang) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.908.988	
	15 Seleksi <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.627.900	
	16 Kegiatan <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	8.128.366	
	17 Purna Tugas <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.775.813	
	18 Seleksi Satgas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.264.666	
	19 Kegiatan <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	9.740.253	
	20 Purna Tugas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.019.000	
	21 Seleksi <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Melaksanakan Misi di Lebanon	1 Orang	2.783.200	
	22 Kegiatan Satgas <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	11.629.700	
	23 Purna Tugas Satgas <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	2.210.480	
	24 Seleksi Satgas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	2.957.166	
	25 Kegiatan Satgas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	17.512.222	
	26 Purna Tugas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.994.777	
	27 Seleksi <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	5.028.000	
	28 Kegiatan <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	31.428.571	
	29 Purna Tugas <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	4.645.571	
	30 Seleksi <i>Level II Hospital</i> TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	4.245.222	
	31 Kegiatan <i>Level II Hospital</i> TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	25.486.666	
	32 Purna Tugas <i>Level II Hospital</i> TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	3.797.000	
	33 Seleksi <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	5.228.219	
	34 Kegiatan <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	10.537.971	
	35 Purna Tugas <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	1.770.757	
	36 Seleksi Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID di Darfur	1 Orang	2.254.367	
	37 Kegiatan Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID di Darfur	1 Orang	7.012.000	
	38 Purna Tugas Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID	1 Orang	1.773.312	
	39 Seleksi Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.244.062	
	40 Kegiatan Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	6.522.972	
	41 Purna Tugas Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO Kongo	1 Orang	1.675.117	
	42 Seleksi KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	3.528.117	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	43 Kegiatan Latpratugas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	6.822.268	
	44 Kegiatan Pemberangkatan KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.969.257	
	45 Purna Tugas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.055.977	
	46 Seleksi KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	3.188.757	
	47 Kegiatan KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	8.341.175	
	48 Purna Tugas Satgas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.637.980	
	49 Seleksi Satgas KI Passus Konga di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.792.183	
	50 Kegiatan KI Passus Konga di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	8.542.513	
	51 Purna Tugas KI Passus Konga di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.611.313	
	52 Seleksi <i>International Monitoring Team</i> (IMT) untuk Pelaksanaan Misi di Filipina	1 Orang	1.923.083	
	53 Kegiatan <i>International Monitoring Team</i> (IMT) untuk Pelaksanaan Misi di Filipina	1 Orang	519.103.833	
	<b>Peserta Operasi Rutin Integratif</b>			
	54 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Orang	76.688	
	55 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Orang	80.788	
	56 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Orang	79.788	
	57 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Orang	81.888	
	58 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 Orang	83.888	
	<b>Peserta Operasi Intelijen Rutin</b>			
	59 Peserta Operasi Intelijen Rayon I	1 Orang	163.648	
	60 Peserta Operasi Intelijen Rayon II	1 Orang	166.648	
	61 Peserta Operasi Intelijen Rayon III	1 Orang	172.748	
	62 Peserta Operasi Intelijen Rayon IV	1 Orang	173.748	
	63 Peserta Operasi Intelijen Rayon V	1 Orang	181.848	
	<b>Peserta Operasi Teritorial Integratif</b>			
	64 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 Orang	124.525	
	65 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 Orang	131.525	
	66 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 Orang	130.525	
	67 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 Orang	136.525	
	68 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 Orang	139.525	
	69 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Terpusat	1 Orang	232.086	
	70 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon I	1 Orang	246.228	
	71 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon II	1 Orang	253.228	
	72 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon III	1 Orang	252.228	
	73 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon IV	1 Orang	258.228	
	74 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon V	1 Orang	261.228	
	75 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 Orang	107.661	
	76 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 Orang	114.661	
	77 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 Orang	113.661	
	78 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 Orang	119.661	
	79 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 Orang	122.661	
	80 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon I	1 Orang	99.478	
	81 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon II	1 Orang	106.478	
	82 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon III	1 Orang	105.478	
	83 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon IV	1 Orang	111.478	
	84 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon V	1 Orang	114.478	
	85 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pantas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 Orang	183.630	
	<b>Operasi Pengamanan VVIP</b>			
	86 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I	1 Orang	159.455	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
87	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II	1 Orang	169.375	
88	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III	1 Orang	168.135	
89	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV	1 Orang	174.335	
90	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V	1 Orang	186.735	
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI</b>			
91	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI Calon Perwira Karier (Pa PK)	1 Orang	478.911	
92	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI Calon PSDP Penerbang TNI	1 Orang	18.239.615	
93	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pnb TNI Calon Mahasiswa Pa PK TNI	1 Orang	19.493.971	
94	Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Orang	19.940.288	
95	Penerimaan CPNS UO Mabes TNI	1 Orang	1.650.325	
96	Calon Pa PK TNI	1 Orang	7.125.875	
	<b>Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar</b>			
97	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	15.096.333	
98	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	17.230.333	
	<b>Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar</b>			
99	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	5.070.000	
100	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar Lanjutan	1 Orang	5.070.000	
	<b>Lulusan Diklan PSDP Penerbang</b>			
101	Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TNI	1 Orang	11.700.088	
	<b>Lulusan Dikma Pa PK Pria</b>			
102	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI	1 Orang	9.750.724	
	<b>Lulusan Dikma Pa PK Wanita</b>			
103	Pendidikan Pertama Pa PK Wanita TNI	1 Orang	10.310.926	
	<b>Seleksi Dikreg Sesko TNI</b>			
104	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.083.473	
	<b>Lulusan Sesko TNI</b>			
105	Lulusan Sesko TNI	1 Orang	6.806.000	
	<b>Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi TNI</b>			
106	Lulusan Dikbangspes Suspa TNI	1 Orang	4.861.583	
107	Lulusan Dikbangspes Susba TNI	1 Orang	4.280.583	
108	Lulusan Dikbangspes SIP TNI	1 Orang	14.479.750	
109	Lulusan Dikbangspes Susjabkamil	1 Orang	5.028.500	
110	Lulusan Dikbangspes Susjabormil	1 Orang	5.013.461	
111	Lulusan Dikbangspes Susgati Bintal	1 Orang	5.016.933	
112	Lulusan DIK SAR TNI	1 Orang	5.037.666	
113	Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	5.034.666	
114	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	5.015.000	
115	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.240.000	
116	Kursus Perwira Intelijen Strategis	1 Orang	4.944.000	
117	Kursus Perwira Sandi dan Intelijen	1 Orang	4.660.000	
118	Kursus Bintara Sandi dan Intelijen	1 Orang	4.415.000	
119	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.465.000	
120	Kursus Perwira Siber dan Intelijen	1 Orang	5.500.000	
121	Kursus Bintara Siber dan Intelijen	1 Orang	5.380.000	
122	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.220.000	
123	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	5.800.000	
124	Pembekalan Intelijen	1 Orang	200.000	
125	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	163.333	
126	Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	163.333	
127	Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	162.050	
128	Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	160.000	
129	Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.600.000	
130	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	5.780.000	
131	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.600.000	
132	Kursus Perwira Intelijen Startegis Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.800.000	
133	Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.400.000	
134	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.360.000	
135	Kursus Perwira Litpers	1 Orang	5.400.000	
136	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.800.000	
137	Penataran Isteri Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.000.000	
138	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.260.000	
139	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.440.000	
140	Lulusan Sekbang Terpadu TNI	1 Orang	9.515.000	
141	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.600.000	
142	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.400.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	143 Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.900.000	
	144 Penataran Isteri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.000.000	
	145 Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.000.000	
	146 Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.600.000	
	147 Lulusan Kursus Perwira Cyber TNI	1 Orang	5.508.500	
	<b>Seleksi Dikbangpes TNI</b>			
	148 Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.018.666	
	149 Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.018.666	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	150 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.371.575	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
	151 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	125.612	
	<b>Latihan Kesiapsiagaan Operasi</b>			
	152 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah I	1 Orang	142.138	
	153 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah II	1 Orang	142.738	
	154 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah III	1 Orang	143.338	
	155 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah IV	1 Orang	143.938	
	156 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah V	1 Orang	144.538	
	<b>Latihan Pembinaan Balakpus TNI</b>			
	157 Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	163.616	
	158 Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.875	
	<b>Latihan Pratugas Operasi</b>			
	159 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	106.104	
	160 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.633	
	161 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.804	
	162 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.975	
	163 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	127.004	
	164 Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	101.407	
	165 Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	103.691	
	166 Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	165.159	
	<b>Layanan Operasional Pertahanan</b>			
	167 Pendapat dan Saran Hukum	1 Kegiatan	938.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
	168 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	22.770.000	
	169 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.255.000	
	170 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.517.000	
	<b>Laporan Pengurusan Tahanan</b>			
	171 Pengurusan Tahanan Sementara	1 Orang	49.000	
	172 Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan	1 Orang	45.000	
	<b>Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer</b>			
	173 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	44.863.000	
	174 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	49.908.000	
	175 Penuntutan dan Pengolahan perkara pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	53.511.000	
	176 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	46.410.000	
	177 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer Rayon 5	1 Perkara	150.801.000	
	178 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer di Otmulti Rayon 1	1 Perkara	98.135.000	
	179 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 2	1 Perkara	118.221.000	
	180 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 3	1 Perkara	138.306.000	
	181 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 4	1 Perkara	138.306.000	
	182 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 5	1 Perkara	185.226.000	
	183 Penuntutan dan pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.117.000	
	184 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.149.000	
	185 Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	5.746.000	
	186 Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.257.000	
	187 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.306.000	
	188 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	18.826.000	
	189 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	7.972.000	
	190 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.095.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	191 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.175.000	
	192 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.233.000	
	193 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.095.000	
	194 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.796.000	
	195 Petunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.037.000	
	196 Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	44.107.000	
	197 Eksekusi Orang dan Barang	1 Perkara	16.744.000	
	<b>Laporan Pembinaan Napi</b>			
	198 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	131.000	
	199 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	138.000	
	200 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	141.000	
	201 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	144.000	
	202 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	216.000	
	203 Juknis Pembinaan Napi Prajurit TNI	1 Orang	2.519.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
	204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I	1 Perkara	18.679.000	
	205 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	13.112.000	
	206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	10.939.000	
	207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	12.772.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
	208 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Perkara	27.365.000	
	209 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	15.286.000	
	210 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. Kasasi	1 Perkara	11.992.000	
	211 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. PK	1 Perkara	17.748.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	212 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Perkara	44.230.000	
	213 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	19.956.000	
	214 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	25.845.000	
	215 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	23.178.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
	216 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I	1 Perkara	118.472.000	
	217 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	21.268.000	
	218 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.519.000	
	219 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	26.024.000	
	<b>Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi</b>			
	220 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Perkara	15.970.000	
<b>012.22</b>	<b>Markas Besar TNI AD</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Latihan Kematraan</b>			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	3.500.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	4.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	4.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	5.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	5.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	5.000.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	5.500.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	6.000.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	6.500.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	7.000.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	6.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	6.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	7.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	7.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	8.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	7.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
17	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	7.500.000	
18	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	8.000.000	
19	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	8.500.000	
20	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	9.000.000	
21	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	4.000.000	
22	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	4.500.000	
23	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	5.000.000	
24	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	5.500.000	
25	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	6.000.000	
26	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.000.000	
27	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.500.000	
28	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
29	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
30	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	
31	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	1.500.000	
32	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.000.000	
33	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.500.000	
34	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	3.000.000	
35	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	3.500.000	
36	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.500.000	
37	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
38	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
39	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	
40	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.500.000	
41	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
42	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
43	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	
44	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.500.000	
45	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	6.000.000	
46	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	1.000.000	
47	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	1.500.000	
48	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.000.000	
49	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.500.000	
50	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	3.000.000	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
51	Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dengan (Gun Pesawat Komersil)	1 Latihan	4.860.393	
52	Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri (Gun Pesawat TNI AU)	1 Latihan	4.684.986	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
53	Latihan Bersama di Dalam Negeri Tanpa Alutsista	1 Latihan	245.279	
54	Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri dengan Pelibatan Alutsista	1 Latihan	272.530	
	<b>Lulusan Dikma Koptar</b>			
55	Kopral Taruna Pria	1 OB	4.920.000	
56	Kopral Taruna Wanita	1 OB	4.920.000	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
57	Sersan Taruna Pria	1 OB	5.170.000	
58	Sersan Taruna Wanita	1 OB	5.170.000	
	<b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>			
59	Sermadatar Pria	1 OB	5.240.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
60	Sermadatar Wanita	1 OB	5.240.000	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
61	Sermatutar Pria	1 OB	5.295.000	
62	Sermatutar Wanita	1 OB	5.295.000	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat</b>			
63	Secaba Pria Rayon I	1 OB	3.580.000	
64	Secaba Pria Rayon II	1 OB	3.634.000	
65	Secaba Pria Rayon III	1 OB	3.800.000	
66	Secaba Pria Rayon IV	1 OB	3.853.000	
67	Secaba Pria Rayon V	1 OB	4.048.000	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat</b>			
68	Dikmaba Wanita	1 OB	3.580.000	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Darat</b>			
69	Dikmata Rayon I	1 OB	3.360.000	
70	Dikmata Rayon II	1 OB	3.414.000	
71	Dikmata Rayon III	1 OB	3.580.000	
72	Dikmata Rayon IV	1 OB	3.623.000	
73	Dikmata Rayon V	1 OB	3.818.000	
74	Pra Dikma TA	1 OB	3.602.000	
	<b>Calon Taruna Matra Darat</b>			
75	Werving Taruna Matra Darat	1 OB	26.601.601	
	<b>Calon Bintara Matra Darat</b>			
76	Werving Bintara Umum Matra Darat		6.650.581	
	<b>Calon Tamtama Matra Darat</b>			
77	Werving Tamtama Matra Darat	1 OB	5.098.254	
	<b>Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat</b>			
78	Diktukpa Reg/Sus	1 OB	3.962.000	
	<b>Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat</b>			
79	Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 OB	3.508.000	
80	Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 OB	3.558.000	
81	Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 OB	3.752.000	
82	Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 OB	3.778.000	
83	Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 OB	3.972.000	
	<b>Peserta Secapareg Matra Darat</b>			
84	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 OK	1.642.000	
85	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 OK	1.683.000	
86	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 OK	1.690.000	
87	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 OK	1.719.000	
88	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 OK	1.727.000	
	<b>Peserta Secabareg Matra Darat</b>			
89	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 OK	1.271.000	
90	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 OK	1.285.000	
91	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 OK	1.324.000	
92	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 OK	1.344.000	
93	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 OK	1.387.000	
	<b>Lulusan Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS</b>			
94	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon I	1 Kegiatan	4.469.666	
95	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon II	1 Kegiatan	4.392.666	
96	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon III	1 Kegiatan	4.541.000	
97	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon IV	1 Kegiatan	4.569.000	
98	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon V	1 Kegiatan	4.745.333	
	<b>Lulusan Seskoad</b>			
99	Seskoad	1 OB	4.942.000	
	<b>Lulusan Selapa Matra Darat</b>			
100	Diklapa I/Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 OB	4.028.000	
101	Diklapa I/Diklapa II Cab Banmin	1 OB	3.831.000	
	<b>Peserta Seskoad</b>			
102	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I	1 OK	6.143.000	
103	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II	1 OK	6.153.000	
104	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III	1 OK	6.218.000	
105	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV	1 OK	6.211.000	
106	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V	1 OK	6.292.000	
	<b>Peserta Selapa Matra Darat</b>			
107	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 OK	4.104.000	
108	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 OK	4.064.000	
109	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 OK	4.188.000	
110	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 OK	4.242.000	
111	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 OK	4.270.000	
	<b>Lulusan Diklatpim PNS</b>			
112	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 OK	15.380.000	
	<b>Lulusan Dikbangpes Perwira Matra Darat</b>			
113	Dikbangpespa Cab Satpur/Banpur	1 OB	3.803.000	
114	Dikbangpespa Cab Banmin	1 OB	3.618.000	
115	Dikcab Perwira Satpur/Banpur	1 OB	5.255.000	
116	Dikcab Perwira Banmin	1 OB	4.975.000	
	<b>Lulusan Dikbangpes Bintara Matra Darat</b>			
117	Dikbangpesba Rayon I	1 OB	3.182.000	
118	Dikbangpesba Rayon II	1 OB	3.226.000	
119	Dikbangpesba Rayon III	1 OB	3.382.000	
120	Dikbangpesba Rayon IV	1 OB	3.426.000	
121	Dikbangpesba Rayon V	1 OB	3.610.000	
122	Dikjur Bintara Rayon I	1 OB	3.336.000	
123	Dikjur Bintara Rayon II	1 OB	3.405.000	
124	Dikjur Bintara Rayon III	1 OB	3.531.000	
125	Dikjur Bintara Rayon IV	1 OB	3.580.000	
126	Dikjur Bintara Rayon V	1 OB	3.759.000	
127	Lulusan Diklatnis PNS	1 OB	6.549.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat</b>			
128	Dikbangspesta Rayon I	1 OB	3.059.000	
129	Dikbangspesta Rayon II	1 OB	3.098.000	
130	Dikbangspesta Rayon III	1 OB	3.230.000	
131	Dikbangspesta Rayon IV	1 OB	3.268.000	
132	Dikbangspesta Rayon V	1 OB	3.464.000	
133	Dikjur Tamtama Rayon I	1 OB	3.161.000	
134	Dikjur Tamtama Rayon II	1 OB	3.217.000	
135	Dikjur Tamtama Rayon III	1 OB	3.366.000	
136	Dikjur Tamtama Rayon IV	1 OB	3.405.000	
137	Dikjur Tamtama Rayon V	1 OB	3.587.000	
	<b>Peserta Dikbangspes Matra Darat</b>			
138	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon I	1 OK	1.196.000	
139	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon II	1 OK	1.251.000	
140	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon III	1 OK	1.256.000	
141	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon IV	1 OK	1.261.000	
142	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon V	1 OK	1.306.000	
	<b>Lulus Pendidikan Keahlian</b>			
143	Pendidikan Keahlian Rayon I	1 OB	3.769.000	
144	Pendidikan Keahlian Rayon II	1 OB	3.813.000	
145	Pendidikan Keahlian Rayon III	1 OB	3.979.000	
146	Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 OB	4.033.000	
147	Pendidikan Keahlian Rayon V	1 OB	4.227.000	
148	Pendidikan Komando dan Kultur	1 OB	5.077.000	
149	Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 OB	3.864.000	
	<b>Lulusan Dik Iptek</b>			
150	Dik Iptek S-1	1 OB	3.770.000	
151	Dik Iptek D-3 (Rayon I)	1 OB	3.158.000	
152	Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 OB	3.199.000	
153	Dik Iptek D-3 (Rayon III)	1 OB	3.370.000	
154	Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 OB	3.420.000	
155	Dik Iptek D-3 (Rayon V)	1 OB	3.617.000	
156	Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 OB	3.102.000	
157	Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 OB	3.148.000	
158	Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 OB	3.314.000	
159	Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 OB	3.359.000	
160	Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 OB	3.546.000	
161	Pendidikan Iptek D4 Matra Darat	1 OB	3.700.000	
	<b>Peserta Dik Profesi dan Keahlian</b>			
162	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 OK	1.833.000	
163	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 OK	1.841.000	
164	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 OK	1.872.000	
165	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 OK	1.876.000	
166	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 OK	1.901.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
167	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Laporan	9.100.000	
168	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Laporan	9.780.000	
169	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Laporan	10.245.000	
170	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Laporan	9.355.000	
171	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Laporan	22.770.000	
172	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Laporan	6.182.000	
173	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Laporan	6.531.000	
174	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Laporan	6.764.000	
175	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Laporan	6.275.000	
176	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Laporan	13.517.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
177	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Laporan	2.255.000	
178	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Laporan	2.410.000	
179	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Laporan	2.515.000	
180	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Laporan	2.295.000	
181	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Laporan	5.540.000	
	<b>Laporan Pengurusan Tahanan</b>			
182	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Laporan	49.000	
183	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Laporan	50.000	
184	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Laporan	55.000	
185	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Laporan	50.000	
186	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Laporan	64.000	
187	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Laporan	44.520	
188	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Laporan	45.810	
189	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Laporan	50.844	
190	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Laporan	46.103	
191	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Laporan	57.931	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
192	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Laporan	6.455.000	
193	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Laporan	6.916.000	
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Laporan	7.248.000	
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Laporan	6.605.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Laporan	16.245.000	
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.471.000	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.471.000	
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.910.000	
200	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Laporan	906.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
201	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Laporan	13.198.000	
202	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Laporan	15.092.000	
203	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Laporan	16.407.000	
204	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Laporan	13.739.000	
205	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Laporan	52.627.000	
206	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.571.000	
207	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.508.000	
208	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.330.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
209	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	28.497.000	
210	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	32.620.000	
211	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	35.567.000	
212	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	29.674.000	
213	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	118.828.000	
214	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Rayon I	1 Laporan	8.423.000	
215	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Rayon II	1 Laporan	9.172.000	
216	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Rayon III	1 Laporan	9.708.000	
217	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Rayon IV	1 Laporan	8.637.000	
218	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Rayon V	1 Laporan	24.862.000	
219	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	14.113.000	
220	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	15.452.000	
221	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	16.470.000	
222	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	15.077.000	
223	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	39.841.000	
224	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	11.944.000	
225	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	12.747.000	
226	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	13.336.000	
227	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	12.319.000	
228	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	28.663.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
229	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	26.432.000	
230	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	30.931.000	
231	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	34.145.000	
232	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	27.717.000	
233	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	124.968.000	
234	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	9.719.000	
235	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	11.593.000	
236	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	12.932.000	
237	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	10.255.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	238 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	50.764.000	
	239 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	14.756.000	
	240 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	16.845.000	
	241 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	18.398.000	
	242 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	15.934.000	
	243 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	56.716.000	
	244 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	14.808.000	
	245 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	17.807.000	
	246 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	19.950.000	
	247 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	15.665.000	
	248 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	80.484.000	
	249 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata) <b>Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi</b>	1 Laporan	906.000	
	250 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon I	1 Perkara	10.090.000	
	251 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon II	1 Perkara	10.799.000	
	252 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon III	1 Perkara	11.618.000	
	253 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon IV	1 Perkara	11.982.000	
	254 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon V	1 Perkara	42.411.000	
012.23	<b>Markas Besar TNI AL</b> <b>SBK Indcks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Taktis TNI</b>			
	1 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI <b>Calon Taruna</b>	1 Orang	441.000	
	2 Calon Taruna <b>Calon Bintara Matra Laut</b>	1 Orang	25.747.000	
	3 Calon Bintara Matra Laut <b>Calon Tamtama Matra Laut</b>	1 Orang	6.437.000	
	4 Calon Tamtama Matra Laut <b>Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL</b>	1 Orang	4.661.000	
	5 Latihan Kematraan	1 Orang	99.000	
	6 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	202.000	
	7 Latihan Satuan	1 Orang	93.000	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	8 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri <b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>	1 Orang	850.000	
	9 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri <b>Peserta Latihan Marinir</b>	1 Orang	146.000	
	10 Latihan Perorangan Marinir	1 Orang	32.000	
	11 Latihan Teknis Marinir	1 Orang	95.000	
	12 Latihan Taktis Marinir	1 Orang	85.000	
	13 Latihan Perorangan Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	48.000	
	14 Latihan Teknis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	167.000	
	15 Latihan Taktis Pasukan Khusus TNI AL <b>Peserta Diklapa</b>	1 Orang	193.000	
	16 Peserta Diklapa <b>Peserta Diktukpa</b>	1 Orang	3.952.000	
	17 Peserta Diktukpa <b>Peserta Diktukba</b>	1 Orang	3.154.000	
	18 Peserta Diktukba <b>Lulusan Dikma Koptar</b>	1 Orang	3.566.000	
	19 Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.918.000	
	20 Dikma Koptar Wanita <b>Lulusan Dikma Sertar</b>	1 Orang	4.918.000	
	21 Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.667.000	
	22 Dikma Sertar Wanita <b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>	1 Orang	6.667.000	
	23 Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.952.000	
	24 Dikma Sermadatar Wanita <b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>	1 Orang	6.952.000	
	25 Dikma Sermatutar Pria	1 Orang	7.297.000	
	26 Dikma Sermatutar Wanita <b>Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut</b>	1 Orang	7.297.000	
	27 Diksargolan Perwira/Pa PK Matra Laut <b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut</b>	1 Orang	5.254.000	
	28 Dikma Bintara Pria Matra Laut <b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut</b>	1 Orang	3.947.000	
	29 Dikma Bintara Wanita Matra Laut <b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut</b>	1 Orang	3.947.000	
	30 Diksargolan Bintara Matra Laut <b>Lulusan Dikma Secatam Matra Laut</b>	1 Orang	3.707.000	
	31 Dikma Tamtama Matra Laut <b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut</b>	1 Orang	3.591.000	
	32 Diksargolan Tamtama Matra Laut <b>Lulusan Dik Seskoal</b>	1 Orang	3.389.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
33	Dik Seskoal <b>Lulusan Diklapa</b>	1 Orang	5.787.000	
34	Diklapa Matra Laut <b>Lulusan Diktukpa</b>	1 Orang	4.082.000	
35	Diktukpa Matra Laut <b>Lulusan Diktukba</b>	1 Orang	3.830.000	
36	Diktukba Matra Laut <b>Lulusan Dikbangpers Perwira/PNS Sederajat Matra Laut</b>	1 Orang	3.639.000	
37	Dikbangsus Perwira Matra Laut <b>Lulusan Dikbangpers Bintara/PNS Sederajat Matra Laut</b>	1 Orang	4.150.000	
38	Dikbangsus Bintara Matra Laut <b>Lulusan Dikbangpers Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut</b>	1 Orang	3.616.000	
39	Dikbangsus Tamtama Matra Laut <b>Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut</b>	1 Orang	3.371.000	
40	Diksus Manajemen Strategik Matra Laut <b>Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut</b>	1 Orang	4.304.000	
41	Diksus Penerbang Matra Laut <b>Lulusan Diksus Brevet Matra Laut</b>	1 Orang	5.803.000	
42	Diksus Brevet Matra Laut <b>Lulusan Dik Lainnya</b>	1 Orang	4.694.000	
43	Dik STTAL D-3	1 Orang	3.572.000	
44	Dik STTAL S-1	1 Orang	3.936.000	
45	Dik STTAL S-2 <b>Peserta Kursus Manajemen Strategik</b>	1 Orang	4.248.000	
46	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000	
47	Peserta Seskoal <b>Peserta STTAL</b>	1 Orang	5.101.000	
48	Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000	
49	Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.904.000	
50	Seleksi Dik S-2 STTAL <b>Peserta Dikspespa</b>	1 Orang	3.977.000	
51	Peserta Dikspespa <b>Peserta Dikspesba</b>	1 Orang	2.771.000	
52	Peserta Dikspesba <b>Peserta Dik Brevet</b>	1 Orang	2.679.000	
53	Peserta Dik Brevet <b>Peserta Penerbang TNI AL</b>	1 Orang	4.345.000	
54	Peserta Penerbang TNI AL <b>Peserta Dikspesta</b>	1 Orang	6.620.000	
55	Peserta Dikspesta <b>Laporan Pembinaan Hukum</b>	1 Orang	2.380.000	
56	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	51.809.000	
57	Pendapat dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut <b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>	1 Laporan	938.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	6.455.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.916.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	7.248.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	6.605.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	16.245.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.471.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.471.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.910.000	
66	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer <b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>	1 Laporan	906.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	13.198.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	15.092.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	16.407.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	13.739.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	52.627.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.571.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.508.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.330.000	
75	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum <b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>	1 Laporan	906.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	28.497.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	32.620.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	35.567.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	29.674.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	118.828.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.423.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	9.172.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.708.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.637.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	24.862.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	14.113.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	15.452.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	16.470.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	15.077.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	39.841.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.944.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	12.747.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	13.336.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	12.319.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	28.663.000	
96	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Penggugat <b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>	1 Laporan	906.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	26.432.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	30.931.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.145.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	27.717.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	124.968.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.719.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.593.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.932.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.255.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	50.764.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.756.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.845.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.398.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.934.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	56.716.000	
112	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	14.808.000	
113	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	17.807.000	
114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	19.950.000	
115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	15.665.000	
116	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	80.484.000	
117	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Tergugat <b>Laporan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)</b>	1 Laporan	906.000	
118	Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.090.000	
119	Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	10.799.000	
120	Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	11.618.000	
121	Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	11.982.000	
122	Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 5 <b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>	1 Perkara	42.411.000	
123	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Laporan	9.100.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	124 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Laporan	9.780.000	
	125 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Laporan	10.245.000	
	126 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Laporan	9.355.000	
	127 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Laporan	22.770.000	
	128 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Laporan	6.182.000	
	129 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Laporan	6.531.000	
	130 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Laporan	6.764.000	
	131 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Laporan	6.275.000	
	132 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Laporan	13.517.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
	133 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Laporan	2.255.000	
	134 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Laporan	2.410.000	
	135 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Laporan	2.515.000	
	136 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Laporan	2.295.000	
	137 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Laporan	5.540.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
	138 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Laporan	49.000	
	139 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Laporan	50.000	
	140 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Laporan	55.000	
	141 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Laporan	50.000	
	142 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Laporan	64.000	
012.24	<b>Markas Besar TNI AU</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Operasi Militer Selain Perang Matra Udara</b>			
	1 Operasi Bhakti TNI	1 Kegiatan	108.988	
	<b>Intelijen dan Pengamanan Matra Udara</b>			
	2 Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 Kegiatan	392.000	
	<b>Peserta Latihan Kematraan</b>			
	3 Peserta Latihan Kematraan	1 Kegiatan	89.994	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Kegiatan	7.321.505	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
	5 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Kegiatan	174.969	
	<b>Peserta Sesko Matra Udara</b>			
	6 Seleksi Seskou dan Sessau Matra Udara	1 orang	2.561.700	
	<b>Peserta Sekkau</b>			
	7 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 orang	1.756.200	
	<b>Peserta Setukpa</b>			
	8 Seleksi Setukpa Matra udara	1 orang	1.587.060	
	<b>Peserta Setukba</b>			
	9 Seleksi Setukba Matra Udara	1 orang	1.363.620	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
	10 Sertar Pria	1 orang	6.271.265	
	11 Sertar Wanita	1 orang	6.271.265	
	<b>Lulusan Dikma Sermadakar</b>			
	12 Pendidikan Sermadatar Pria	1 orang	6.512.414	
	13 Pendidikan Sermadatar Wanita	1 orang	6.512.414	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
	14 Pendidikan Sermatutar Pria	1 orang	6.913.446	
	15 Pendidikan Sermatutar Wanita	1 Orang	6.913.446	
	<b>Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara</b>			
	16 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara</b>			
	17 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara</b>			
	18 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara</b>			
	19 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.304.941	
	20 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.304.941	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Udara</b>			
	21 Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara</b>			
	22 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358	
	<b>Lulusan Dikma Selcbang/Seknav</b>			
	23 Pendidikan Selcbang/Seknav Matra Udara	1 Orang	7.054.322	
	24 Pendidikan Selcbang/Seknav Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.323	
	<b>Lulusan Dikma SIN/SIP</b>			
	25 Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188	
	<b>Lulusan SESKOU</b>			
	26 Pendidikan SESKOU	1 Orang	5.064.263	
	27 Pendidikan SESSAU	1 Orang	4.910.030	
	<b>Lulusan SEKKAU</b>			
	28 Pendidikan SEKKAU	1 Orang	3.886.550	
	29 Pendidikan SUSPAJEMEN	1 Orang	3.847.000	
	<b>Lulusan SETUKPA</b>			
	30 Pendidikan SETUKPA	1 Orang	3.642.843	
	<b>Lulusan SETUKBA</b>			
	31 Pendidikan SETUKBA	1 Orang	3.390.143	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara</b>			
	32 Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara</b>			
	33 Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.750	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara</b>			
	34 Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Peserta Dikbangspes Perwira</b>			
35	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120	
	<b>Peserta Dikbangspes Bintara/Tamtama</b>			
36	Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920	
	<b>Lulusan Dikma Koptar</b>			
37	Koptar Pria	1 Orang	5.338.266	
38	Koptar Wanita	1 Orang	5.338.266	
	<b>Calon Karbol</b>			
39	Werving Taruna/Taruni	1 Orang	26.594.868	
	<b>Calon Bintara Matra Udara</b>			
40	Werving Bintara Matra Udara	1 Orang	6.646.362	
	<b>Calon Tamtama Matra Udara</b>			
41	Werving Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.812.270	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
42	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	9.100.000	
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	9.780.000	
44	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	10.245.000	
45	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	9.355.000	
46	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	22.770.000	
	<b>Laporan Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana</b>			
47	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Kegiatan	6.182.000	
48	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Kegiatan	6.531.000	
49	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Kegiatan	6.764.000	
50	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Kegiatan	6.275.000	
51	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Kegiatan	13.517.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
52	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	2.255.000	
53	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	2.410.000	
54	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	2.515.000	
55	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	2.295.000	
56	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	5.540.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
57	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Kegiatan	49.000	
58	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Kegiatan	50.000	
59	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Kegiatan	55.000	
60	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Kegiatan	50.000	
61	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Kegiatan	64.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	6.455.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 2	1 Kegiatan	6.916.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	7.248.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	6.605.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	16.245.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk Banding	1 Kegiatan	2.471.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk Kasasi	1 Kegiatan	2.471.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk PK	1 Kegiatan	2.910.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	13.198.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	15.092.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	16.407.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	13.739.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	52.627.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk Banding	1 Kegiatan	4.571.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk Kasasi	1 Kegiatan	3.508.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum TK PK	1 Kegiatan	6.330.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	28.497.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	32.620.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	35.567.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	29.674.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	118.828.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 1	1 Kegiatan	8.423.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 2	1 Kegiatan	9.172.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 3	1 Kegiatan	9.708.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 4	1 Kegiatan	8.637.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 5	1 Kegiatan	24.862.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	14.113.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	15.452.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	16.470.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	15.077.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	39.841.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 1	1 Kegiatan	11.944.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 2	1 Kegiatan	12.747.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 3	1 Kegiatan	13.336.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 4	1 Kegiatan	12.319.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 5	1 Kegiatan	28.663.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	26.432.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	30.931.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	34.145.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	27.717.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	124.968.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 1	1 Kegiatan	9.719.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 2	1 Kegiatan	11.593.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 3	1 Kegiatan	12.932.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 4	1 Kegiatan	10.255.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 5	1 Kegiatan	50.764.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	14.756.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	16.845.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	18.398.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	15.934.000	
112	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	56.716.000	
113	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk PK Rayon 1	1 Kegiatan	14.808.000	
114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk PK Rayon 2	1 Kegiatan	17.807.000	
115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk PK Rayon 3	1 Kegiatan	19.950.000	
116	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk PK Rayon 4	1 Kegiatan	15.665.000	
117	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk PK Rayon 5	1 Kegiatan	80.484.000	
	<b>Pendapat dan Saran Hukum</b>			
118	Pendapat dan Saran Hukum Pidana	1 Kegiatan	906.000	
119	Pendapat dan Saran Hukum Perdata	1 Kegiatan	906.000	
	<b>Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi</b>			
120	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.090.000	
121	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	10.799.000	
122	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	11.618.000	
123	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	11.982.000	
124	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	42.411.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Pembinaan Narapidana</b>			
	1. Pembinaan Kemandirian Narapidana (Vol - 20 Napi)	20 Narapidana	38.300.000	
	<b>Layanan Perawatan Narapidana/tahanan</b>			
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial	10 Narapidana/ Tahanan	32.780.000	
	3. Kegiatan Rehabilitasi Medis	10 Narapidana/ Tahanan	26.400.000	
	<b>Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan</b>			
	4. Kegiatan Pasca Rehabilitasi	10 Klien	14.700.000	
	<b>Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak</b>			
	5. Pelatihan Keterampilan Anak	20 Anak	23.300.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Tindak Lanjut MOU</b>			
	6. Penyusunan Naskah Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	18.892.000	
	<b>Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik</b>			
	7. Rekomendasi Penegakan Kode Etik	1 Dokumen	5.880.000	
	<b>Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen</b>			
	8. Penyelesaian Pengaduan	1 UPT	10.824.000	
	<b>Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan</b>			
	9. Pembimbingan dan Pengawasan	1 Klien	2.625.000	
	10. Pendampingan Peradilan Anak	1 Klien	2.025.000	
	11. Rekomendasi Program Pelayanan dan Pembinaan	1 Klien	975.000	
013.06	<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produk Intelijen Keimigrasian</b>			
	1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 Laporan	64.380.000	
	<b>Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian</b>			
	2. Operasi Mandiri	1 LHK	64.380.000	
	3. Operasi Gabungan	1 LHK	80.170.000	
	4. Penyelidikan Keimigrasian	1 LHK	109.688.000	
	<b>Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian</b>			
	5. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	1 LHK	41.808.000	
	6. Operasi Mandiri di Wilayah	1 LHK	51.495.000	
	7. Operasi Gabungan di Wilayah	1 LHK	88.870.000	
	8. Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 LHK	123.156.000	
013.10	<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang	8.000.000	
	2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	
013.12	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1. Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	270 Orang	2.962.525.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Lulusan Taruna Ilmu Pemasyarakatan</b>			
	2. Pendidikan Taruna Tk. I	1 Orang	30.798.455	
	3. Pendidikan Taruna Tk. II	1 Orang	28.054.177	
	4. Pendidikan Taruna Tk. III	1 Orang	27.743.627	
	5. Pendidikan Taruna Tk. IV	1 Orang	29.082.387	
	<b>Lulusan Peserta Didik Keimigrasian</b>			
	6. Pendidikan Taruna Tk. I	1 Orang	31.559.083	
	7. Pendidikan Taruna Tk. II	1 Orang	28.379.777	
	8. Pendidikan Taruna Tk. III	1 Orang	27.909.207	
	9. Pendidikan Taruna Tk. IV	1 Orang	29.316.548	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	280 Rekomendasi	2.136.728.000	Eselon 1 Pusat 1 Tim 12 orang 10 hari, on the spot 5 hari, Daerah 1 Tim 4 orang
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	120 Rekomendasi	1.430.352.000	Pusat 7 orang 10 hari, Daerah 4 orang 8 hari
	3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta SAKIP Kementerian	20 Rekomendasi	143.832.000	Kementerian 12 orang 8 hari, Eselon 1 16 orang 8 hari
	4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	162 Rekomendasi	907.695.000	Reviu LK Kementerian 15 orang hari pusat dan 5 hari Jawa Barat, Reviu LK Eselon 1 5 orang 5 hari 3 Eselon 1, Reviu RKA-KL Eselon 1 5 orang 3 hari 3 Eselon 1
	5 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	272 Rekomendasi	2.133.728.000	Pusat 15 orang 10 hari, on the spot 5 hari, Daerah 4 orang 16 hari
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	90 Rekomendasi	1.078.764.000	Pusat 7 orang 10 hari, Daerah 4 orang 8 hari
	7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10 Rekomendasi	73.560.000	Eselon 1 16 orang 8 hari
	8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	156 Rekomendasi	328.350.000	Reviu LK Eselon 1 5 orang 10 hari, Reviu RKA-KL Eselon 1 5 orang 3 hari
	9 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	280 Rekomendasi	2.146.628.000	Pusat 15 orang 10 hari, on the spot 5 hari, Daerah 4 orang 16 hari
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	90 Rekomendasi	1.344.480.000	Pusat 7 orang 10 hari, Daerah 5 orang 8 hari
	11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	15 Rekomendasi	119.700.000	Eselon 1 15 orang 8 hari
	12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	204 Rekomendasi	689.220.000	Reviu RKA-KL Eselon 1 5 orang 10 hari, Reviu RKA-K/L Eselon 1 8 orang 3 hari
	13 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	280 Rekomendasi	2.084.260.000	Daerah 8 Tim 5 orang 16 hari (2 tahap)
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	96 Rekomendasi	1.425.252.000	Pusat 7 orang 8 hari, Daerah 9 Tim 4 orang 8 hari (4 tahap)
	15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	15 Rekomendasi	81.540.000	Eselon I (3 Eselon I x 5 orang) 15 orang 8 hari, Daerah (14 orang x 6 hari)
	16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	120 Rekomendasi	359.100.000	Reviu LK Eselon 1 3 Eselon 1 5 orang 7 hari, Reviu RKA-K/L Eselon 1 4 orang 3 hari
	17 Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	250 Rekomendasi	4.419.986.000	Pusat 4 orang 15 hari, Daerah 4 orang 15 hari
018.03	<b>Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	1 Pembuatan Lubang Biopori Wilayah Kemote	10 Hektar	49.350.000	
	2 Pembuatan Lubang Biopori Wilayah Non Remote	10 Hektar	44.250.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	3 Pembuatan Sumur Pantek Wilayah Remote	10 Hektar	67.110.000	
	4 Pembuatan Sumur Pantek Wilayah Non Remote	10 Hektar	54.661.000	
<b>018.04</b>	<b>Direktorat Jenderal Hortikultura</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>GAP Sayuran dan Tanaman Obat</b>			
	1 GAP Sayuran dan Tanaman Obat	1 Kelompok	41.000.000	
	<b>Penerapan PHT (PPHT)</b>			
	2 Penerapan PHT Wilayah Barat	1 Kelompok	43.000.000	
	3 Penerapan PHT Wilayah Timur	1 Kelompok	45.000.000	
	<b>GAP Buah dan Florikultura</b>			
	4 GAP Buah	1 Kelompok	48.000.000	
	5 GAP Florikultura	1 Kelompok	48.000.000	
	<b>GHP Hortikultura</b>			
	6 GHP Hortikultura	1 Kelompok	41.400.000	
<b>018.08</b>	<b>Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Irigasi Perpompaaan</b>			
	1 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000	
	2 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000	
	3 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Timur	1 Unit	105.000.000	
	4 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000	
	5 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000	
	6 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Tengah	1 Unit	85.000.000	
	7 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000	
	8 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000	
	9 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Barat	1 Unit	76.000.000	
<b>018.09</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan</b>			
	1 Bahan Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	267.806.000	
	<b>VUB Bibit Tebu (Budset)</b>			
	2 Produksi Benih Tebu	1.000.000 Mata	149.678.000	
	<b>Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi</b>			
	3 Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100 Jenis	239.853.000	
	<b>Bibit Sumber Ternak Unggulan</b>			
	4 Bibit Unggul Ternak KUB-1	42.308 Ekor	341.262.000	
	5 Bibit Unggul Ternak Sensi-I Agrinak	31.881 Ekor	345.412.000	
	6 Bibit Unggul Ternak Itik Petelur	30.576 Ekor	265.649.000	
	7 Bibit Unggul Ternak Itik Pedaging	19.263 Ekor	291.100.000	
	8 Bibit Unggul Ternak Domba Compass Agrinak/Bahtera Agrinak/Komposit Garut Agrinak	150 Ekor	435.870.000	
	9 Bibit Unggul Ternak Kelinci Reksi Agrinak	479 Ekor	99.768.000	
	<b>SRK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Sumber Daya Genetik Yang Terkarakterisasi, Terevaluasi, dan Terdokumentasi</b>			
	10 Karakterisasi Molekular SDG Tanaman Pangan	1 Akses	518.000	
<b>018.12</b>	<b>Badan Karantina Pertanian</b>			
	<b>SRK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati</b>			
	1 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan	1 Uji Terap	171.080.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
023.18	<b>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Berbasis Industri</b> 1 Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Berbasis Industri <b>Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)</b> 2 Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	1 Orang  1 Orang	4.410.000  6.299.682	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.05	<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	1 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	26.300.000	
	2 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah) di Daerah Sulit Kategori I (Daerah Sulit selain Provinsi Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	36.300.000	
	3 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida Pada Dinding Rumah) di Daerah Sulit Kategori II (Provinsi Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	43.000.000	
	4 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i> )	1 Layanan	10.000.000	
	5 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i> ) di Daerah Sulit	1 Layanan	17.000.000	
	6 Survei Evaluasi <i>Prevalensi Mikrofilaria</i> Pasca POPM (Pre TAS)	1 Layanan	39.900.000	
	7 Survei Evaluasi <i>Prevalensi Mikrofilaria</i> Pasca POPM (Pre TAS) di Daerah Sulit	1 Layanan	63.340.000	
	8 Penyemprotan Fokus Keong <i>Schistosomiasis</i>	1 Layanan	28.230.000	
	9 Layanan Pemeriksaan TB Resisten Obat dengan Metode Biakan/Kultur/Kepekaan Obat	1 Layanan	450.000	
	10 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	1 Layanan	600.000	
	11 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandara	1 Layanan	600.000	
	12 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1 Layanan	400.000	
	13 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBN	1 Layanan	800.000	
	14 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori I)	1 Layanan	945.000	
	15 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)	1 Layanan	895.000	
	16 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.000.000	
	17 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	1 Layanan	1.455.000	
	18 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	320.000	
	19 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	1.061.000	
	20 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	320.000	
	21 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	433.000	
	22 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.673.000	
	23 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.227.000	
	24 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pcs	1 Layanan	2.573.000	
	25 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	1 Layanan	3.025.000	
	26 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	1 Layanan	4.555.000	
	27 Layanan Penemuan Aktif <i>Surveilans Migrasi Malaria</i>	1 Layanan	870.000	
	28 Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium	1 Layanan	38.900.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	<b>Inspektorat Jenderal</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Layanan Pengawasan Internal</b> 1 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah DKI Jakarta 2 Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Pulau Jawa (Luar DKI Jakarta) 3 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah Luar Pulau Jawa	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	18.640.000 76.482.000 106.652.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.11	<b>Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>SDM Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial</b>			
	1. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.494.800	
	2. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	9.978.066	
	3. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.165.266	
	4. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	8.327.466	
	5. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	7.151.266	
	6. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (120 JLT/14 Hari)	1 Orang	11.675.333	
	7. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (50 JLT/6 Hari)	1 Orang	7.787.333	
	8. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (70 JLT/8 Hari)	1 Orang	8.738.666	
	9. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (100 JLT/12 Hari)	1 Orang	10.574.000	
	10. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	8.390.333	
	11. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	18.409.166	
	12. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	9.566.666	
	13. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	16.353.300	
	14. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	9.546.166	
	15. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yoerakarta (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	8.780.833	
	16. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	7.990.500	
	17. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	6.866.166	
	18. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	21.173.100	
	19. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	11.702.933	
	20. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	10.536.700	
	21. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	9.728.100	
	22. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	8.514.866	
	23. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	18.234.033	
	24. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	11.675.700	
	25. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	10.784.366	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
26	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	9.893.033	
27	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	7.946.166	
28	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	49.775.366	
29	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	34.007.100	
30	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	31.690.666	
31	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	29.491.333	
32	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura(60 JPL/7 Hari)	1 Orang	18.250.633	
	<b>Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat</b>			
33	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	9.643.225	
34	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Lembang (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	12.888.625	
35	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta(165 JPL/20 Hari)	1 Orang	8.725.750	
36	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	10.290.675	
37	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makasar (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	10.412.700	
38	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (PEKSOS) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	32.403.475	
	<b>Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang Telah Dibina/Dikembangkan Profesinya</b>			
39	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Sertifikasi	1 Orang	2.081.747	
	<b>Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi</b>			
40	Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Akreditasi	1 Lembaga	3.985.363	
	<b>Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial</b>			
41	Mahasiswa Program Pasca Sarjana Terapan	1 Mahasiswa	6.172.664	
42	Mahasiswa Program Pasca Sarjana	1 Mahasiswa	24.112.680	
	<b>Desa/Kelurahan Yang Mendapatkan Penyuluhan Sosial</b>			
43	Penyuluhan Sosial Keliling	1 Desa/Kelurahan	76.364.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I</b>			
	1 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I	1 Laporan	1.3+1.845.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II</b>			
	2 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	1 Laporan	2.088.920.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III</b>			
	3 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III	1 Laporan	2.387.750.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV</b>			
	4 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV	1 Laporan	1.690.480.000	
032.04	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produksi Induk Unggul</b>			
	1 Calon Induk Unggul Ikan Mas	1 Ekor	26.788	
	2 Calon Induk Unggul Ikan Gurame	1 Ekor	45.303	
	3 Calon Induk Unggul Ikan Patin	1 Ekor	39.538	
	4 Calon Induk Unggul Ikan Nila	1 Ekor	17.395	
	5 Calon Induk Unggul Ikan Lele	1 Ekor	41.098	
	6 Calon Induk Unggul Udang <i>Marguensis</i> / Pisang	1 Ekor	36.817	
	7 Calon Induk Unggul Udang Windu	1 Ekor	105.088	
	8 Calon Induk Unggul Udang Vanamac	1 Ekor	40.232	
	9 Calon Induk Unggul Ikan Kerapu	1 Ekor	346.689	
	10 Calon Induk Unggul Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	317.617	
	11 Calon Induk Unggul Ikan Kakap Putih	1 Ekor	330.734	
	12 Calon Induk Unggul Ikan Bubara	1 Ekor	337.936	
	13 Calon Induk Unggul Ikan Bandeng	1 Ekor	97.332	
	14 Calon Induk Ikan Jelawat	1 Ekor	54.163	
	15 Calon Induk Unggul Ikan Kakap Merah	1 Ekor	331.110	
	16 Calon Induk Unggul Ikan Cobia	1 Ekor	260.406	
	17 Calon Induk Unggul Ikan Hias	1 Ekor	116.550	
	18 Calon Induk Unggul Nila Salin	1 Ekor	15.995	
	19 Calon Induk Unggul Kepiting	1 Ekor	150.399	
	20 Calon Induk Unggul Tiram Mutiara	1 Ekor	63.760	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Tawar Yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	21 Benih Ikan Nila	1 Ekor	250	
	22 Benih Mas	1 Ekor	235	
	23 Benih Gurame	1 Ekor	1.397	
	24 Benih Patin	1 Ekor	352	
	25 Benih Ikan Lele	1 Ekor	309	
	26 Benih Ikan Nilem	1 Ekor	235	
	27 Benih Udang Galah	1 Ekor	107	
	28 Benih Ikan Papuyu	1 Ekor	216	
	29 Benih Ikan Jelawat	1 Ekor	273	
	30 Benih Ikan Tawes	1 Ekor	238	
	31 Benih Ikan Hias	1 Ekor	496	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Payau yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	32 Benih Udang <i>Merguenses</i> (putih)	1 Ekor	38	
	33 Benih Udang Windu	1 Ekor	47	
	34 Benih <i>Vanamei</i>	1 Ekor	40	
	35 Benih Ikan Bandeng	1 Ekor	177	
	36 Benih Ikan Nila Salin	1 Ekor	181	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	37 Benih Kepiting	1 Ekor	640	
	38 Benih Rajungan	1 Ekor	550	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	39 Benih Ikan Kerapu	1 Ekor	8.898	
	40 Benih Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	5.718	
	41 Benih Ikan Kakap Putih	1 Ekor	4.742	
	42 Benih Ikan Bubara	1 Ekor	5.700	
	43 Benih Ikan Hias	1 Ekor	2.106	
	44 Benih Kakap Merah	1 Ekor	7.166	
	45 Benih Cobia	1 Ekor	6.989	
	46 Tiram Mutiara	1 Ekor	689	
	<b>Bibit Rumput Laut Yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	47 Bibit Rumput Laut	1 Kg	30.794	
	<b>Sampel yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan</b>			
	48 Sampel Residu	1 Sampel	904.618	
	49 Sampel Kualitas Air	1 Sampel	191.815	
	50 Sampel Patologi	1 Sampel	544.578	
	51 Sampel Mikrobiologi	1 Sampel	505.403	
	52 Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	489.265	
	53 Sampel Obat	1 Sampel	589.957	
	54 Sampel Biologi Molekuler	1 Sampel	905.112	
	<b>Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT</b>			
	55 Pakan Apung	1 Kg	13.443	
	56 Pakan Tenggelam	1 Kg	12.343	
032.05	<b>Dirktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Kompeten</b>			
	1 PPNS Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	1.553.690.000	
	<b>Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten</b>			
	2 Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten	60 Orang	2.437.172.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</b>			
	3 Operasional Speed Boat 6,5 Meter	1 Hari Operasi	2.181.000	
	4 Operasional Speed Boat 8 Meter	1 Hari Operasi	4.312.000	
	5 Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin)	1 Hari Operasi	7.846.000	
	6 Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	1 Hari Operasi	7.524.000	
	7 Operasional Speed Boat 16 Meter	1 Hari Operasi	9.337.000	
	8 Operasional Rigid Inflatable Boat	1 Hari Operasi	6.215.000	
	9 Operasional Rubber Boat	1 Hari Operasi	1.799.000	
	<b>Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik Secara Akuntabel</b>			
	10 Pemberkasasn Perkara TPKP Mudah	1 Kasus	20.625.000	
	11 Pemberkasasn Perkara TPKP Sedang	1 Kasus	28.625.000	
	12 Pemberkasasn Perkara TPKP Sulit	1 Kasus	49.275.000	
	13 Pemberkasasn Perkara TPKP Sangat Sulit	1 Kasus	66.425.000	
	<b>Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Ditangani Secara Akuntabel</b>			
	14 Penanganan Barang Bukti TPKP	1 Kasus	19.624.000	
	15 Penanganan Awak Kapal TPKP	1 Kasus	38.500.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (042)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
042.06	<b>Deputi Penguatan Risbang</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Jurnal Ilmiah Yang Ditingkatkan Mutunya</b>  1 Manajemen Jurnal Ilmiah Yang Ditingkatkan Mutunya Menuju Terakreditasi 2 Manajemen Jurnal Ilmiah Yang Ditingkatkan Mutunya Menuju Bereputasi Internasional  <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Jurnal Ilmiah Yang Ditingkatkan Mutunya</b>  3 Bantuan Tata Kelola Jurnal 4 Insentif Jurnal Terindeks Global	    550 Jurnal 50 Jurnal   1 Jurnal 1 Jurnal	    2.969.650.000 1.147.800.000   69.925.000 50.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	<b>Badan Pusat Statistik</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia</b>			
1	Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 Publikasi/laporan	907.823.000	
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
2	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	38 Layanan	2.233.161.000	
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
3	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	38 Layanan	2.013.454.000	
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
4	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	38 Layanan	2.184.554.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
5	Diklat Teknis Substansi	1 Layanan	8.170.428	
6	Diklat Fungsional	1 Layanan	17.121.692	
7	Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	7.296.351	
	<b>Layanan Pendidikan dan Kedinasan</b>			
8	Program D IV	1 Layanan	4.091.110	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.04	<b>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peta Bidang Tanah</b>			
	1 Peta Bidang Tanah Kategori I (ASN)	1 Bidang	285.000	Kategori I (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
	2 Peta Bidang Tanah Kategori II (ASN)	1 Bidang	243.840	Kategori II (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau)
	3 Peta Bidang Tanah Kategori III (ASN)	1 Bidang	203.880	Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo)
	4 Peta Bidang Tanah Kategori IV (ASN)	1 Bidang	160.360	Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu)
	5 Peta Bidang Tanah Kategori V (ASN)	1 Bidang	118.040	Kategori V (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Banten)
	6 Peta Bidang Tanah Kategori VI Kcpulauan (ASN)	1 Bidang	280.000	Kategori VI (daerah Kepulauan/ Terpencil/ Terluar)
056.05	<b>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Sertipikat Hak Atas Tanah</b>			
	1 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori I	1 Bidang	259.220	Kategori I (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
	2 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori II	1 Bidang	226.320	Kategori II (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau)
	3 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori III	1 Bidang	194.360	Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo)

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	4 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori IV	1 Bidang	159.580	Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu)
	5 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori V	1 Bidang	125.740	Kategori V (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Banten)
	6 Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kategori VI	1 Bidang	356.740	Kategori VI (daerah Kepulauan/ Terpencil/ Terluar)

Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	<p>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia SRK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) <b>Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dikonversi</b></p> <p>1 Penjiilidan Bahan Perpustakaan</p> <p><b>Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno</b></p> <p>2 Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno Dalam Bentuk CD dan File Akses</p>	<p>6.000 Eksemplar</p> <p>6.000 Eksemplar</p>	<p>1.288.800.000</p> <p>497.566.000</p>	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	<b>Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta</b>			
	1 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	2 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	61.465.000	
	3 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.216.000	
	4 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.800.000	
	5 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	43.698.000	
	6 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	7 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	61.465.000	
	8 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.216.000	
	9 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	10 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	13.538.000	
	11 Tindak Lanjut Hasil Penertiban (Dalam Kota)	1 Layanan	6.700.000	
	12 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	25.865.000	
	13 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	62.957.000	
	14 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	13.538.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan</b>			
	15 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.761.000	
	16 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.876.000	
	17 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	11.085.000	
	18 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	36.380.000	
	19 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.780.000	
	20 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.816.000	
	21 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.530.000	
	22 Tindak Lanjut Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	10.614.000	
	23 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	22.827.000	
	24 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	49.658.000	
	25 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	37.550.000	
	26 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	37.550.000	
	27 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.780.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung</b>			
	28 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.328.000	
	29 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.575.000	
	30 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	13.375.000	
	31 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	35.685.000	
	32 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.475.000	
	33 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	23.575.000	
	34 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.457.000	
	35 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.575.000	
	36 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	16.610.000	
	37 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	27.825.000	
	38 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	17.800.000	
	39 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	93.090.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang</b>			



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
41	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.050.000	
42	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara (Karimuniawa)	1 Layanan	27.480.000	
43	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	9.000.000	
44	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	31.730.000	
45	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara (Karimuniawa)	1 Layanan	30.530.000	
46	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
47	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	22.050.000	
48	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara (Karimuniawa)	1 Layanan	23.800.000	
49	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
50	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.050.000	
51	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara (Karimuniawa)	1 Layanan	27.480.000	
52	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	35.570.000	
53	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	67.269.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya</b>			
54	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.020.000	
55	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.340.000	
56	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.110.000	
57	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	84.910.000	
58	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1 Layanan	35.610.000	
59	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.125.000	
60	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.100.000	
61	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	47.285.000	
62	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.020.000	
63	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.410.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda</b>			
64	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.325.000	
65	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.350.000	
66	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.528.000	
67	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.350.000	
68	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Rutin/Nasional)	1 Layanan	18.405.000	
69	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Rutin/Nasional)	1 Layanan	63.290.000	
70	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
71	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
72	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.450.000	
73	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.300.000	
74	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
75	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
76	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat dan Laut	1 Layanan	11.140.000	
77	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	43.350.000	
78	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	11.405.000	
79	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (CAT Reguler)	1 Layanan	39.850.000	
80	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (CAT Reguler)	1 Layanan	74.584.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar</b>			
81	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.336.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	82 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	26.500.000	
	83 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	23.275.000	
	84 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	17.670.000	
	85 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	72.800.000	
	86 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.605.000	
	87 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	24.800.000	
	88 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.275.000	
	89 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	24.800.000	
	90 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.275.000	
	91 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.336.000	
	92 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	15.560.000	
	93 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Makassar	1 Layanan	114.150.000	
	94 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	77.210.000	
	95 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	17.335.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru</b>			
	96 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.290.000	
	97 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
	98 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	22.250.000	
	99 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	60.025.000	
	100 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	25.665.000	
	101 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
	102 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.290.000	
	103 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
	104 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	83.625.000	
	105 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.295.000	
	106 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.295.000	
	107 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.765.000	
	108 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.295.000	
	109 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	90.655.000	
	110 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	51.475.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang</b>			
	111 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.616.000	
	112 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	20.353.000	
	113 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Lewat Sungai/Laut	1 Layanan	15.553.000	
	114 Penertiban Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.548.000	
	115 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.042.000	
	116 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.624.000	
	117 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	20.353.000	
	118 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
	119 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	19.979.000	
	120 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	25.968.000	
	121 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	49.143.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta</b>			
	122 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota D.I.Yogyakarta	1 Layanan	4.668.000	
	123 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota D.I.Yogyakarta	1 Layanan	11.036.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
124	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Yogyakarta	1 Layanan	21.503.000	
125	Penertiban Frekuensi dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Yogyakarta	1 Layanan	36.813.000	
126	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Yogyakarta	1 Layanan	4.112.000	
127	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Yogyakarta	1 Layanan	8.374.000	
128	Pengukuran Frekuensi Radio D.I.Yogyakarta	1 Layanan	13.120.000	
129	Tindak Lanjut Hasil Penertiban D.I.Yogyakarta	1 Layanan	34.170.000	
130	Ujian Negara Amatir Radio D.I.Yogyakarta	1 Layanan	33.698.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar</b>			
131	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.210.000	
132	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.900.000	
133	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.050.000	
134	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	81.665.000	
135	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.200.000	
136	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.500.000	
137	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi	1 Layanan	24.500.000	
138	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	62.200.000	
139	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	32.790.000	
140	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	28.650.000	
141	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.650.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang</b>			
142	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	7.070.000	
143	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	26.250.000	
144	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	43.195.000	
145	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	23.740.000	
146	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	35.415.000	
147	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	55.150.000	
148	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.290.000	
149	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.000.000	
150	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.320.000	
151	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.300.000	
152	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.050.000	
153	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.320.000	
154	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang	1 Layanan	11.126.000	
155	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.450.000	
156	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	29.454.000	
157	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	114.445.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado</b>			
158	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
159	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
160	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Udara	1 Layanan	15.054.000	
161	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Laut Kepulauan	1 Layanan	14.814.000	
162	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	20.530.000	
163	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	75.100.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
164	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data dan Izin Stasiun Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
165	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data dan Izin Stasiun Radio Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
166	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data dan Izin Stasiun Radio Luar Kota Sulut Transportasi Udara Kepulauan	1 Layanan	15.054.000	
167	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	3.156.000	
168	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
169	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut Transportasi Udara Kepulauan	1 Layanan	15.054.000	
170	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	16.096.000	
171	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	39.611.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura</b>			
172	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
173	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	17.300.000	
174	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	67.532.000	
175	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	66.032.000	
176	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	21.910.000	
177	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	130.606.000	
178	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
179	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	17.300.000	
180	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	67.532.000	
181	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	65.532.000	
182	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
183	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota (Papua)	1 Layanan	58.532.000	
184	Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
185	Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	68.029.000	
186	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	14.456.000	
187	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	55.524.000	
188	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	42.096.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh</b>			
189	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.352.000	
190	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.830.000	
191	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut (Aceh)	1 Layanan	22.300.000	
192	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	22.020.000	
193	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	51.006.000	
194	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Aceh	1 Layanan	4.202.000	
195	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Aceh	1 Layanan	31.191.000	
196	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.352.000	
197	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.635.000	
198	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) dengan Menggunakan Transportasi Laut (Aceh)	1 Layanan	22.105.000	
199	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	12.138.000	
200	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Banda Aceh	1 Layanan	54.171.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam</b>			
201	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.900.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	202 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.098.000	
	203 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	36.473.000	
	204 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	27.820.000	
	205 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	64.608.000	
	206 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.175.000	
	207 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.098.000	
	208 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	36.473.000	
	209 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.320.000	
	210 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.628.000	
	211 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi	1 Layanan	36.473.000	
	212 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	36.811.000	
	213 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	38.721.000	
	214 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	65.732.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang</b>			
	215 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.600.000	
	216 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.850.000	
	217 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	39.225.000	
	218 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	13.572.000	
	219 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	32.167.000	
	220 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.100.000	
	221 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	20.350.000	
	222 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Transportasi Laut	1 Layanan	39.212.000	
	223 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.600.000	
	224 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.725.000	
	225 Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	39.362.000	
	226 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	32.065.000	
	227 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	14.125.000	
	228 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	28.465.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jambi</b>			
	229 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.550.000	
	230 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.100.000	
	231 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.702.000	
	232 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.142.000	
	233 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.600.000	
	234 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	20.400.000	
	235 Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	20.900.000	
	236 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.922.000	
	237 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	66.465.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu</b>			
	238 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
	239 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.050.000	
	240 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	25.485.000	
	241 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.690.000	
	242 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	42.780.000	
	243 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu	1 Layanan	9.000.000	
	244 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
	245 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.050.000	
	246 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
247	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.050.000	
248	Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	54.400.000	
249	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	16.150.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung</b>			
250	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.500.000	
251	Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
252	Penertiban Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	11.350.000	
253	Penertiban Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	29.122.000	
254	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.987.000	
255	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
256	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
257	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
258	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	3.480.000	
259	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	6.544.000	
260	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	27.780.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak</b>			
261	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
262	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
263	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
264	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.455.000	
265	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.225.000	
266	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	52.901.000	
267	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
268	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
269	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	24.448.000	
270	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.245.000	
271	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
272	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
273	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	10.660.000	
274	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	63.232.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin</b>			
275	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
276	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.025.000	
277	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.525.000	
278	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	42.700.000	
279	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
280	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	22.025.000	
281	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	22.025.000	
282	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	19.030.000	
283	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	52.450.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya</b>			
284	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.410.000	
285	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.450.000	
286	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.400.000	
287	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.168.000	
288	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.410.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
289	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	23.630.000	
290	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.250.000	
291	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.630.000	
292	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.600.000	
293	Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram</b>	1 Layanan	44.370.000	
294	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.856.000	
295	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota dengan Transportasi Darat (NTB)	1 Layanan	22.547.000	
296	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dengan Transportasi Penyeberangan Air/Laut (NTB)	1 Layanan	23.738.000	
297	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dengan Transportasi Laut di Gili/Kepulauan (NTB)	1 Layanan	14.659.000	
298	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dengan Transportasi Udara (NTB)	1 Layanan	37.660.000	
299	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	19.080.000	
300	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat (NTB)	1 Layanan	58.762.000	
301	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Penyeberangan Air/Laut (NTB)	1 Layanan	61.203.000	
302	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Penyeberangan Laut di Gili/Kepulauan (NTB)	1 Layanan	30.440.000	
303	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara (NTB)	1 Layanan	84.982.000	
304	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.856.000	
305	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota dengan Transportasi Darat (NTB)	1 Layanan	22.547.000	
306	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota dengan Transportasi Penyeberangan Air/Laut (NTB)	1 Layanan	23.738.000	
307	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota dengan Transportasi Penyeberangan Laut di Gili/Kepulauan (NTB)	1 Layanan	14.659.000	
308	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota dengan Transportasi Udara (NTB)	1 Layanan	37.660.000	
309	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.047.000	
310	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Darat (NTB)	1 Layanan	22.547.000	
311	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Penyeberangan Air/Laut (NTB)	1 Layanan	23.738.000	
312	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut di Gili/Kepulauan (NTB)	1 Layanan	14.659.000	
313	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Udara (NTB)	1 Layanan	37.660.000	
314	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (NTB)	1 Layanan	52.341.000	
315	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok (NTB)	1 Layanan	59.987.000	
316	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapan</b>	1 Layanan	65.265.000	
317	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.703.000	
318	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.742.000	
319	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.630.000	
320	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	69.645.000	
321	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.703.000	
322	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	22.742.000	
323	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	31.173.000	
324	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.274.000	
325	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.692.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	326 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.628.000	
	327 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	44.242.000	
	328 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	82.508.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu</b>			
	329 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.400.000	
	330 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	23.350.000	
	331 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	24.250.000	
	332 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	35.580.000	
	333 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	32.250.000	
	334 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	43.270.000	
	335 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota		6.250.000	
	336 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	22.250.000	
	337 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	28.630.000	
	338 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	35.930.000	
	339 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
	340 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	23.350.000	
	341 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	25.350.000	
	342 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	33.400.000	
	343 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	15.180.000	
	344 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Luar Kota	1 Layanan	58.910.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke</b>			
	345 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	7.981.000	
	346 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	54.032.000	
	347 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	39.314.000	
	348 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	119.623.000	
	349 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.912.000	
	350 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	52.115.000	
	351 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.610.000	
	352 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	52.186.000	
	353 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	41.090.000	
	354 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	100.913.000	
	355 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	10.230.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon</b>			
	356 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.595.000	
	357 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.464.000	
	358 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	23.945.000	
	359 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	19.136.000	
	360 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	30.170.000	
	361 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	42.474.000	
	362 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.595.000	
	363 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	25.615.000	
	364 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	23.681.000	
	365 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.517.000	
	366 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	13.320.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
367	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	23.670.000	
368	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.230.000	
369	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	20.234.000	
370	Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	39.848.000	
371	Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	52.012.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate</b>			
372	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.425.000	
373	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.350.000	
374	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.100.000	
375	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Pulau Terluar	1 Layanan	44.100.000	
376	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.890.000	
377	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	61.740.000	
378	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	69.940.000	
379	Inspeksi Dalam Rangka Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.425.000	
380	Inspeksi Dalam Rangka Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.350.000	
381	Inspeksi Dalam Rangka Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.100.000	
382	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.975.000	
383	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.125.000	
384	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.100.000	
385	Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	21.100.000	
386	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	43.850.000	
387	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang</b>	1 Layanan	8.825.000	
388	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
389	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.850.000	
390	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.050.000	
391	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
392	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.850.000	
393	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.050.000	
394	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
395	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.850.000	
396	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.050.000	
397	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	8.080.000	
398	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	20.725.000	
399	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	21.475.000	
400	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	9.490.000	
401	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Gorontalo</b>	1 Layanan	44.450.000	
402	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
403	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
404	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.960.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
405	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	70.960.000	
406	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
407	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
408	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
409	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
410	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	5.760.000	
411	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	22.040.000	
412	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	2.220.000	
413	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	40.990.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang</b>			
414	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.227.000	
415	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.373.000	
416	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.786.000	
417	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	60.461.000	
418	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.434.000	
419	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.166.000	
420	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.745.000	
421	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.715.000	
422	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.824.000	
423	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	50.198.000	
424	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	21.328.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Monitoring Sorong</b>			
425	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
426	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	40.657.000	
427	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.657.000	
428	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	52.557.000	
429	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.390.000	
430	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
431	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	50.957.000	
432	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	40.657.000	
433	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	52.557.000	
434	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.780.000	
435	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	52.557.000	
436	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Darat	1 Layanan	40.657.000	
437	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Udara	1 Layanan	52.280.000	
438	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	40.572.000	
439	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	13.060.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju</b>			
440	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
441	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
442	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.431.000	
443	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	62.500.000	
444	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
445	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
446	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
447	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
448	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	2.535.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
449	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	7.810.000	
450	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	36.620.000	
451	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta</b>	1 Layanan	61.024.000	
452	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
453	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Koordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	9.946.000	
454	Penanganan Gangguan Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan</b>	1 Layanan	13.100.000	
455	Layanan Penyelesaian Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	4.770.000	
456	Layanan Penyelesaian Gangguan Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung</b>	1 Layanan	22.490.000	
457	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.475.000	
458	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang</b>	1 Layanan	21.175.000	
459	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
460	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya</b>	1 Layanan	22.050.000	
461	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.415.000	
462	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda</b>	1 Layanan	23.375.000	
463	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
464	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Darat	1 Layanan	25.300.000	
465	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.450.000	
466	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar</b>	1 Layanan	27.300.000	
467	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru</b>	1 Layanan	23.275.000	
468	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.290.000	
469	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.200.000	
470	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang</b>	1 Layanan	33.295.000	
471	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.624.000	
472	Penanganan Gangguan Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta</b>	1 Layanan	20.353.000	
473	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar</b>	1 Layanan	15.100.000	
474	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.385.000	
475	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang</b>	1 Layanan	19.776.000	
476	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kudang	1 Layanan	6.320.000	
477	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.000.000	
478	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado</b>	1 Layanan	43.320.000	
479	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Sulawesi Utara <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura</b>	1 Layanan	21.937.000	
480	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
481	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) <b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh</b>	1 Layanan	57.732.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
482	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.352.000	
483	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.323.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam</b>			
484	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.320.000	
485	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.098.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang</b>			
486	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.650.000	
487	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.550.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi</b>			
488	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	20.700.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu</b>			
489	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
490	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.050.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung</b>			
491	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
492	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.340.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak</b>			
493	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
494	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.660.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin</b>			
495	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
496	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.025.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya</b>			
497	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.200.000	
498	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.580.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram</b>			
499	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.047.000	
500	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	23.738.000	
501	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Udara (NTB)	1 Layanan	37.660.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan</b>			
502	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.562.000	
503	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.537.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari</b>			
504	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
505	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.250.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke</b>			
506	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.323.000	
507	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	50.401.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari</b>			
508	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.100.000	
509	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	52.100.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju</b>			
510	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.375.000	
511	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.150.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon</b>			
512	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.400.000	
513	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	18.594.000	
514	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	25.796.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate</b>			
515	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.990.000	
516	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.990.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang</b>			
517	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
518	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.850.000	
519	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	21.475.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo</b>			
520	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
521	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang</b>			
522	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.149.000	
523	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.166.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Tanjung Selor</b>			
524	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
525	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.350.000	
526	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	32.050.000	
527	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.150.000	
528	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	67.370.000	
529	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
530	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.350.000	
531	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	32.050.000	
532	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
533	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota Dengan Transportasi Darat	1 Layanan	26.350.000	
534	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	32.050.000	
535	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota	1 Layanan	13.690.000	
536	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota	1 Layanan	49.560.000	
537	Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	45.485.000	
538	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	82.885.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tanjung Selor</b>			
539	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
540	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	33.450.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	<b>Badan Pengawas Obat dan Makanan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di DKI Jakarta</b>			
	1 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jakarta	1 Perkara	77.128.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Barat</b>			
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	98.056.000	
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	1 Perkara	86.588.000	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	86.588.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Tengah</b>			
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	92.229.000	
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Banjumas	1 Perkara	82.531.000	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	82.531.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di D.I. Yogyakarta</b>			
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	97.787.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Timur</b>			
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	99.060.000	
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	88.265.000	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	88.265.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Aceh</b>			
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Aceh	1 Perkara	94.734.000	
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tengah	1 Perkara	84.425.000	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	84.425.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Utara</b>			
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	91.370.000	
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	83.712.000	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	80.492.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Barat</b>			
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	96.007.000	
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Pavalumbu	1 Perkara	84.601.000	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	84.601.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Riau</b>			
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	97.683.000	
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	85.853.000	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	85.853.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jambi</b>			
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Jambi	1 Perkara	92.239.000	
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	81.910.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Selatan</b>			
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	92.550.000	
	27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Lubuklinggau	1 Perkara	82.117.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Lampung</b>			
	28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	87.789.000	
	29 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulangagung	1 Perkara	79.395.000	
	<b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat</b>			

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
30	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Pontianak	1 Perkara	98.180.000	
31	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sanggau <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah</b>	1 Perkara	85.543.000	
32	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Palangka Raya	1 Perkara	95.727.000	
33	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan</b>	1 Perkara	86.153.000	
34	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	90.418.000	
35	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	80.564.000	
36	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Timur</b>	1 Perkara	80.564.000	
37	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	135.026.000	
38	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	113.477.000	
39	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Utara</b>	1 Perkara	113.477.000	
40	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	92.819.000	
41	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Tengah</b>	1 Perkara	81.962.000	
42	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Palu	1 Perkara	94.392.000	
43	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan</b>	1 Perkara	83.142.000	
44	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perkara	96.760.000	
45	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Palopo <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Tenggara</b>	1 Perkara	84.909.000	
46	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perkara	97.911.000	
47	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Baubau <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Maluku</b>	1 Perkara	85.874.000	
48	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perkara	169.693.000	
49	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bali</b>	1 Perkara	129.208.000	
50	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perkara	104.448.000	
51	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Duleleng <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Barat</b>	1 Perkara	91.687.000	
52	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perkara	100.548.000	
53	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Timur</b>	1 Perkara	88.708.000	
54	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Kupang	1 Perkara	101.049.000	
55	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Ende	1 Perkara	86.859.000	
56	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Papua</b>	1 Perkara	86.859.000	
57	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Javapura	1 Perkara	186.134.000	
58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Merauke	1 Perkara	166.982.000	
59	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bengkulu</b>	1 Perkara	154.256.000	
60	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perkara	90.573.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Rejang Lebong <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Maluku Utara</b>	1 Perkara	79.871.000	
62	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Sofifi	1 Perkara	102.537.000	
63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Banten</b>	1 Perkara	88.813.000	
64	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perkara	98.470.000	
65	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bangka Belitung</b>	1 Perkara	83.525.000	
66	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perkara	96.214.000	
67	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Gorontalo</b>	1 Perkara	84.839.000	
68	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Gorontalo <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau</b>	1 Perkara	95.295.000	
69	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Batam	1 Perkara	120.122.000	
70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Papua Barat</b>	1 Perkara	101.523.000	
71	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perkara	172.990.000	
72	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong <b>Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat</b>	1 Perkara	146.059.000	
73	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Mamuju <b>Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas</b>	1 Perkara	90.180.000	
74	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	1 Perkara	65.981.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	<b>Badan Narkotika Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Laporan	285.500	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN</b>			
	2 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	37.466.500	
	3 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	16.860.745	
	4 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	9.212.857	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b>			
	5 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	32.424.666	
	6 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.044.739	
	7 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	10.306.800	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka</b>			
	8 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	32.901.000	
	9 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.718.968	
	10 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	9.437.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam</b>			
	11 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	26.967.000	
	12 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	15.107.571	
	13 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	7.676.333	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda</b>			
	14 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	24.447.333	
	15 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	13.349.666	
	16 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	6.684.545	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang</b>			
	17 Layanan Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	26.828.000	
	18 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	15.117.375	
	19 Layanan Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	7.097.190	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi  SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			
	1 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Balai 5 Hari	1 Orang	4.354.500	
	2 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Balai 6 Hari	1 Orang	4.944.633	
	3 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.060.900	
	4 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.754.333	
	5 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.454.866	
	6 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	6.111.100	
	7 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	6.795.600	
	8 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Balai 5 Hari	1 Orang	4.396.000	
	9 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Balai 6 Hari	1 Orang	4.883.966	
	10 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.020.733	
	11 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.677.866	
	12 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.435.033	
	13 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Balai 5 Hari	1 Orang	4.293.533	
	14 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Balai 6 Hari	1 Orang	4.453.533	
	15 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	5.703.800	
	16 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Balai 5 Hari	1 Orang	4.610.200	
	17 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.214.266	
	18 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.817.600	
	19 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Balai 6 Hari	1 Orang	4.893.533	
	20 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Balai 5 Hari	1 Orang	5.217.966	
	21 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Balai 6 Hari	1 Orang	5.665.900	
	22 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	7.761.000	
	23 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Balai 5 Hari	1 Orang	5.428.500	
	24 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Balai 6 Hari	1 Orang	5.702.666	
	25 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.403.166	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	26 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.854.333	
	27 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	5.773.500	
	28 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	6.263.333	
	29 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Dalam 6 Hari	1 Orang	4.420.000	
	30 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	6.594.666	
	31 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	8.892.666	
	32 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	8.078.000	
	33 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	8.583.333	
	34 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	8.758.000	
	35 Layanan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	9.463.333	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Informasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu 1 Informasi Tanda Waktu	1 Informasi	352.047.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	<b>Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	3.470 Data	120.033.000	
	2 Data Radioaktifitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	396 Data	288.010.000	
	3 Rekomendasi Hasil Uji <i>Profisiensi</i> Laboratorium di BATAN untuk Pengukuran Radiasi Gamma	24 Rekomendasi	194.060.000	
	4 Paket Limbah Radioaktif Padat Olahan dalam Drum	100 Paket Limbah	249.750.000	
	5 Paket Limbah Radioaktif Semi Cair/ <i>Resin</i> Olahan dalam <i>Shell</i> Beton	4 Paket Limbah	301.265.000	
	6 Paket Limbah Radioaktif Semi Cair Olahan dalam <i>Shell</i> Beton	2 Paket Limbah	460.714.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (081)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Jasa Pelatihan Teknologi <i>Polimer</i> (PNBP)	14 Jasa Pelatihan Teknologi	258.364.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (082)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Data Penginderaan Jarak Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi	25.018 Data	459.344.000	
	2 Data Antariksa dan Atmofer (BPPA Sumedang)	37 GB	93.564.000	
	3 Data Antariksa dan Atmofer (BPPA Pasuruan)	95 GB	104.432.000	
	4 Data Antariksa dan Atmofer (BPPA Pontianak)	145 GB	109.710.000	
	5 Data Antariksa dan Atmofer (BPAA Agam)	461 GB	195.054.000	
	6 Akuisisi Data Antariksa dan Atmosfer	5 GB	31.000.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
084.01	<p><b>Badan Standardisasi Nasional</b>  <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Standar Nasional Indonesia Bidang Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal</b></p>			
	1 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	102.527.000	
	2 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	102.527.000	
	3 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	102.527.000	
	4 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	102.527.000	
	5 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	102.527.000	
	6 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	107.780.000	
	7 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	107.780.000	
	8 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	107.780.000	
	9 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	107.780.000	
	10 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	107.780.000	
	11 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	274.627.000	
	12 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	373.469.000	
	13 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	547.391.000	
	14 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	648.717.000	
	15 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	761.294.000	
	16 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	880.443.000	
	17 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.048.031.000	
	18 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.151.738.000	
	19 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.330.420.000	
	20 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.434.127.000	
	21 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	402.434.000	
	22 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	505.385.000	
	23 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	671.958.000	
	24 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	779.805.000	
	25 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	871.403.000	
	26 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	992.177.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
27	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.138.785.000	
28	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.236.059.000	
29	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.391.278.000	
30	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.482.876.000	
31	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	404.002.000	
32	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	502.844.000	
33	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	676.766.000	
34	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	778.092.000	
35	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	890.669.000	
36	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	1.009.818.000	
37	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.177.406.000	
38	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.281.113.000	
39	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.459.795.000	
40	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.563.502.000	
41	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
42	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	51.233.000	
43	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
44	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
	<b>Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</b>			
45	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	102.527.000	
46	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	102.527.000	
47	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	102.527.000	
48	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	102.527.000	
49	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	102.527.000	
50	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	107.780.000	
51	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	107.780.000	
52	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	107.780.000	
53	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	107.780.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
54	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	107.780.000	
55	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	274.627.000	
56	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	373.469.000	
57	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	547.391.000	
58	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	648.717.000	
59	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	761.294.000	
60	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	880.443.000	
61	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.048.031.000	
62	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.151.738.000	
63	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.330.420.000	
64	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.434.127.000	
65	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	402.434.000	
66	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	505.385.000	
67	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	671.958.000	
68	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	779.805.000	
69	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	871.403.000	
70	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	992.177.000	
71	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.138.785.000	
72	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.236.059.000	
73	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.391.278.000	
74	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.482.876.000	
75	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	404.002.000	
76	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	502.844.000	
77	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	676.766.000	
78	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	778.092.000	
79	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	890.669.000	
80	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	1.009.818.000	
81	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.177.406.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
82	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.281.113.000	
83	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.459.795.000	
84	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.563.502.000	
85	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
86	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	51.233.000	
87	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
88	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI <b>Standar Nasional Indonesia Bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif</b>	1 SNI	139.725.000	
89	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	102.527.000	
90	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	102.527.000	
91	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	102.527.000	
92	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	102.527.000	
93	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	102.527.000	
94	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	107.780.000	
95	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	107.780.000	
96	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	107.780.000	
97	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	107.780.000	
98	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	107.780.000	
99	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	274.627.000	
100	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	373.469.000	
101	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	547.391.000	
102	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	648.717.000	
103	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	761.294.000	
104	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	880.443.000	
105	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.048.031.000	
106	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.151.738.000	
107	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.330.420.000	
108	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.434.127.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	109 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	402.434.000	
	110 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	505.385.000	
	111 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	671.958.000	
	112 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	779.805.000	
	113 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	871.403.000	
	114 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	992.117.000	
	115 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.138.785.000	
	116 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.236.059.000	
	117 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.391.278.000	
	118 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.482.876.000	
	119 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	404.002.000	
	120 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	502.844.000	
	121 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	676.766.000	
	122 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	778.092.000	
	123 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	890.669.000	
	124 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	1.009.818.000	
	125 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.177.406.000	
	126 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.281.113.000	
	127 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.459.795.000	
	128 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.563.502.000	
	129 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
	130 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	51.233.000	
	131 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	
	132 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	139.725.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Aceh</b>			
	1 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	42.603.000	
	2 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	42.603.000	
	3 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	42.603.000	
	4 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	42.603.000	
	5 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	42.603.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>			
	6 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	41.405.000	
	7 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	41.405.000	
	8 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	41.405.000	
	9 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	41.405.000	
	10 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	41.405.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</b>			
	11 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	45.972.000	
	12 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	45.972.000	
	13 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	45.972.000	
	14 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	45.972.000	
	15 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	45.972.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Riau</b>			
	16 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	54.144.000	
	17 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	54.144.000	
	18 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	54.144.000	
	19 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	54.144.000	
	20 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	54.144.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Jambi</b>			
	21 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	41.023.000	
	22 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	41.023.000	
	23 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	41.023.000	
	24 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	41.023.000	
	25 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	41.023.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Bengkulu</b>			
	26 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	45.313.000	
	27 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	45.313.000	
	28 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	45.313.000	
	29 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	45.313.000	
	30 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	45.313.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan</b>			
	31 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	53.916.000	
	32 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	53.916.000	
	33 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	53.916.000	
	34 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	53.916.000	
	35 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	53.916.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Lampung</b>			
	36 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	37.340.000	
	37 LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	37.340.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
38	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	37.340.000	
39	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	37.340.000	
40	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	37.340.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b>			
41	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	34.798.000	
42	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	34.798.000	
43	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	34.798.000	
44	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	34.798.000	
45	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	34.798.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Jawa Barat</b>			
46	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	44.294.000	
47	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	44.294.000	
48	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	44.294.000	
49	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	44.294.000	
50	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	44.294.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</b>			
51	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	38.973.000	
52	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	38.973.000	
53	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	38.973.000	
54	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	38.973.000	
55	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	38.973.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan DI Yogyakarta</b>			
56	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	54.621.000	
57	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	54.621.000	
58	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	54.621.000	
59	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	54.621.000	
60	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	54.621.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Jawa Timur</b>			
61	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	46.757.000	
62	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	46.757.000	
63	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	46.757.000	
64	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	46.757.000	
65	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	46.757.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat</b>			
66	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	42.811.000	
67	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	42.811.000	
68	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	42.811.000	
69	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	42.811.000	
70	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	42.811.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
71	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	46.038.000	
72	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	46.038.000	
73	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	46.038.000	
74	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	46.038.000	
75	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	46.038.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</b>			

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
76	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	43.035.000	
77	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	43.035.000	
78	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	43.035.000	
79	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	43.035.000	
80	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	43.035.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</b>			
81	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	61.051.000	
82	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	61.051.000	
83	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	61.051.000	
84	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	61.051.000	
85	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	61.051.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara</b>			
86	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	48.070.000	
87	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	48.070.000	
88	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	48.070.000	
89	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	48.070.000	
90	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	48.070.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
91	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	57.135.000	
92	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	57.135.000	
93	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	57.135.000	
94	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	57.135.000	
95	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	57.135.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
96	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	51.235.000	
97	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	51.235.000	
98	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	51.235.000	
99	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	51.235.000	
100	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	51.235.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
101	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	47.545.000	
102	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	47.545.000	
103	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	47.545.000	
104	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	47.545.000	
105	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	47.545.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Bali</b>			
106	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	57.085.000	
107	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	57.085.000	
108	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	57.085.000	
109	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	57.085.000	
110	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	57.085.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
111	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	58.212.000	
112	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	58.212.000	
113	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	58.212.000	
114	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	58.212.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
115	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	1 LHP	58.212.000	
116	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	45.085.000	
117	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	45.085.000	
118	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	45.085.000	
119	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	45.085.000	
120	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Maluku</b>	1 LHP	45.085.000	
121	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	56.416.625	
122	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	56.416.625	
123	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	56.416.625	
124	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	56.416.625	
125	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Papua</b>	1 LHP	56.416.625	
126	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	75.677.000	
127	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	75.677.000	
128	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	75.677.000	
129	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	75.677.000	
130	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Papua Barat</b>	1 LHP	75.677.000	
131	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	62.304.000	
132	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	62.304.000	
133	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	62.304.000	
134	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	62.304.000	
135	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau</b>	1 LHP	62.304.000	
136	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	48.462.000	
137	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	48.462.000	
138	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	48.462.000	
139	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	48.462.000	
140	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	1 LHP	48.462.000	
141	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	49.117.000	
142	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	49.117.000	
143	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	49.117.000	
144	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	49.117.000	
145	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Banten</b>	1 LHP	49.117.000	
146	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	46.356.000	
147	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	46.356.000	
148	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	46.356.000	
149	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	46.356.000	
150	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>	1 LHP	46.356.000	
151	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	51.542.000	
152	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	51.542.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
153	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	51.542.000	
154	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	51.542.000	
155	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	51.542.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat</b>			
156	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	48.248.000	
157	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	48.248.000	
158	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	48.248.000	
159	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	48.248.000	
160	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	48.248.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara</b>			
161	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	49.232.000	
162	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	49.232.000	
163	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	49.232.000	
164	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	49.232.000	
165	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	49.232.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara</b>			
166	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	61.051.000	
167	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam dan PMK	1 LHP	61.051.000	
168	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	61.051.000	
169	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara	1 LHP	61.051.000	
170	LHP Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi	1 LHP	61.051.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Aceh</b>			
171	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	31.011.000	
172	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	31.011.000	
173	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	31.011.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>			
174	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	30.005.000	
175	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	30.005.000	
176	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	30.005.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</b>			
177	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.012.000	
178	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.012.000	
179	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.012.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Riau</b>			
180	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	38.880.000	
181	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	38.880.000	
182	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	38.880.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Jambi</b>			
183	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	29.743.000	
184	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	29.743.000	
185	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	29.743.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Bengkulu</b>			
186	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.289.000	
187	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.289.000	
188	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.289.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan</b>			
189	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	38.424.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
190	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	38.424.000	
191	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	38.424.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Lampung</b>			
192	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	27.380.000	
193	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	27.380.000	
194	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	27.380.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b>			
195	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	24.358.000	
196	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	24.358.000	
197	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	24.358.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Jawa Barat</b>			
198	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	31.694.000	
199	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	31.694.000	
200	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	31.694.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</b>			
201	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	28.101.000	
202	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	28.101.000	
203	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	28.101.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan DI Yogyakarta</b>			
204	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	38.841.000	
205	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	38.841.000	
206	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	38.841.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Jawa Timur</b>			
207	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.269.000	
208	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.269.000	
209	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.269.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat</b>			
210	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	31.195.000	
211	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	31.195.000	
212	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	31.195.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
213	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.210.000	
214	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.210.000	
215	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.210.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
216	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	31.395.000	
217	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	31.395.000	
218	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	31.395.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</b>			
219	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	45.643.000	
220	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	45.643.000	
221	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	45.643.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara</b>			
222	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.646.000	
223	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.646.000	
224	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.646.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah</b>			

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
225	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	40.683.000	
226	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	40.683.000	
227	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	40.683.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
228	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	36.643.000	
229	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	36.643.000	
230	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	36.643.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
231	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.805.000	
232	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.805.000	
233	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.805.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Bali</b>			
234	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	39.805.000	
235	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	39.805.000	
236	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	39.805.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
237	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	41.532.000	
238	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	41.532.000	
239	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	41.532.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
240	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	32.725.000	
241	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	32.725.000	
242	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	32.725.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Maluku</b>			
243	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	43.252.000	
244	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	43.252.000	
245	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	43.252.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Papua</b>			
246	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	58.169.000	
247	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	58.169.000	
248	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	58.169.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Papua Barat</b>			
249	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	48.744.000	
250	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	48.744.000	
251	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	48.744.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau</b>			
252	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	33.918.000	
253	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	33.918.000	
254	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	33.918.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>			
255	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	36.133.000	
256	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	36.133.000	
257	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	36.133.000	
	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Banten</b>			
258	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	32.700.000	
259	LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	32.700.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	260 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>	1 LHP	32.700.000	
	261 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	37.334.000	
	262 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	37.334.000	
	263 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat</b>	1 LHP	37.334.000	
	264 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	34.280.000	
	265 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	34.280.000	
	266 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Maluku Utara</b>	1 LHP	34.280.000	
	267 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	37.712.000	
	268 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	37.712.000	
	269 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara <b>Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP dan Kapabilitas APIP di Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara</b>	1 LHP	37.712.000	
	270 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	1 LHP	45.643.000	
	271 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1 LHP	45.643.000	
	272 LHP SPIP dan Kapabilitas APIP Bidang Akuntan Negara	1 LHP	45.643.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	<b>Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Layanan Sertifikasi</b>			
	1 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	10.191.000	
	2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	20.799.000	
	3 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	1.760.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	3.808.000	
	5 Sertifikasi <i>Person</i>	1 Sertifikat	677.000	
	6 Sertifikasi Bimbingan Teknis	1 Sertifikat	3.272.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	<b>Komisi Yudisial RI</b>  <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Investigasi Pendalaman Kasus</b> 1 Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  <b>Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung</b> 2 Uji Kelayakan Calon Hakim Agung	25 Laporan   30 Laporan	1.572.693.000   2.280.692.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
107.01	<b>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
	1 Audit Kinerja	1 Layanan	3.257.027.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pembinaan Potensi SAR (Prioritas Nasional)</b>			
	2 Pelatihan Potensi SAR Korwil I (Prioritas Nasional)	1 Dokumen	4.500.000	
	3 Pelatihan Potensi SAR Korwil II (Prioritas Nasional)	1 Dokumen	4.500.000	
	4 Pelatihan Potensi SAR Korwil III (Prioritas Nasional)	1 Dokumen	4.700.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116)

(dalam rupiah)

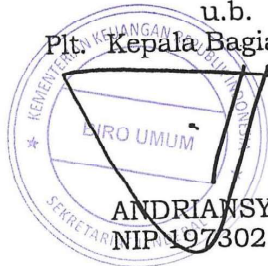
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	<b>Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional</b>			
	1 Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	3.750.000	
	2 Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	835.000	
	3 Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	710.000	
	4 Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.782.000	
	5 Produksi Komentar	1 Paket Acara	481.000	
	6 Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.560.000	
	7 Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	350.000	
	8 Siaran Wawancara	1 Paket Acara	550.000	
	<b>Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional, dan Nasional</b>			
	9 Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	1.183.000	
	10 Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	4.804.000	
	11 Produksi SPOT	1 Paket Acara	189.000	
	12 Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	851.000	
	13 Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	652.000	
	14 Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	971.000	
	15 Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.855.000	
	16 Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	909.000	
	17 Siaran KUIS	1 Paket Acara	396.000	
	18 Produksi Sandiwaras Radio	1 Paket Acara	1.776.000	
	19 Siaran Pergelaran	1 Paket Acara	14.167.000	
	20 Produksi Komentar	1 Paket Acara	447.000	
	21 Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.410.000	
	22 Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.505.000	
	23 Siaran Obrolan	1 Paket Acara	455.000	
	24 Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	322.000	
	25 Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	80.000	
	26 Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	2.932.000	
	27 Siaran Wawancara	1 Paket Acara	570.000	
	<b>Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan</b>			
	28 Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	4.525.000	
	29 Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	6.026.000	
	30 Produksi SPOT	1 Paket Acara	499.000	
	31 Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	850.000	
	32 Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	651.000	
	33 Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	958.000	
	34 Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.853.000	
	35 Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	910.000	
	36 Siaran KUIS	1 Paket Acara	396.000	
	37 Produksi Komentar	1 Paket Acara	912.000	
	38 Produksi Dokumenter	1 Paket acara	1.409.000	
	39 Produksi Kaleidoskop	1 Paket acara	1.451.000	
	40 Siaran Obrolan	1 Paket acara	455.000	
	41 Produksi <i>Filler</i>	1 Paket acara	325.000	
	42 Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket acara	79.000	
	43 Siaran Wawancara	1 Paket acara	572.000	
	44 Siaran Adlibs	1 Paket acara	144.000	
	45 Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket acara	4.917.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP.19730213 199703 1 001